

LAPORAN

KINERJA KOTA MADIUN



2020



MADIUN
Kota Pendekar



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kota Madiun tahun 2020 telah berhasil diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sebagaimana yang seharusnya.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan *good governance*, maka perlu disusun Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Madiun tahun 2020 merupakan bentuk evaluasi untuk mengungkapkan keberhasilan ataupun menjelaskan ketidakberhasilan penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Selain itu Laporan Kinerja merupakan rangkaian proses akuntabilitas penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024 ke dalam perencanaan sasaran, program dan kegiatan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini diupayakan untuk menyampaikan kinerja Pemerintah Kota Madiun atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun tahun 2020 dalam mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari mekanisme evaluasi kinerja maka dalam penyusunan Laporan Kinerja perlu terus diupayakan penyempurnaan, terutama dukungan ketersediaan data kinerja yang baku, valid, serta handal dari masing-masing indikator kinerja.



Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Madiun dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pembangunan, maupun dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat, maka masukan dari semua pihak sangat diharapkan, sehingga akan memberikan dukungan terhadap terwujudnya *good governance* di Kota Madiun.

Madiun, Maret 2021


WALIKOTA MADIUN
Drs. H. MAIDI, SH., MM, M.Pd.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Madiun berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (Good Governance) dan berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Pemerintah Kota Madiun sebagai penyelenggara Pemerintahan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi kewenangannya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memiliki 2 (dua) fungsi yaitu :

1. Informasi kinerja ini disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban penerima amanat, dan ;
2. Informasi kinerja yang dihasilkan dapat digunakan oleh publik untuk memberikan saran/masukan guna memicu perbaikan kinerja Pemerintah Kota Madiun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yang menjabarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih kedalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan, program dan kegiatan pembangunan.



Oleh karenanya seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2020 perlu evaluasi guna mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi berguna untuk menyusun perencanaan pada tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan.

Untuk mewujudkan visi **“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”**, dilakukan dengan cara mewujudkannya pada 4 (empat) elemen kehidupan kota yaitu Pemerintahan, Masyarakat, Swasta, dan Lingkungan. Pemerintahan dikatakan sejahtera apabila pemerintahan tersebut telah mampu memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar para pegawainya. Untuk masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang segala kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, perwujudannya adalah rendahnya angka kemiskinan dan pengangguran. Kesejahteraan swasta dapat tercapai apabila ditandai dengan peningkatan pendapatan atau laba dari hasil usaha ekonominya dan terwujudnya persaingan yang sehat. Lingkungan yang sejahtera adalah lingkungan yang tata ruangnya mampu mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan mendukung kelestarian alam dan keanekaragaman hayati.

Dalam pelaksanaan pembangunan harus dapat diukur realisasinya, oleh karenanya Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2020 telah menetapkan Indikator Kinerja dalam setiap Sasaran sebagai alat ukur atas keberhasilan atau kegagalan untuk merepresentasikan dari integritas pembangunan di Kota Madiun selama 5 (lima) tahun kedepan (2019-2020).

Pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam capaian setiap sasaran Pembangunan di Kota Madiun Tahun 2019 dengan alat ukur Indikator Kinerja dengan hasil sebagai berikut :

1. Misi 1 Tujuan 1, Peningkatan kualitas Pemerintahan yang Baik tercapai dengan Sangat Baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 3 (tiga) Sasaran yang diukur melalui 7 (tujuh) indikator, menghasilkan capaian 4 (empat) indikator sesuai/melampaui target dan 3 (tiga) indikator di bawah target.



2. Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan, Tujuan 1 : Peningkatan kualitas Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan tercapai dengan Sangat Baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 2 (dua) Sasaran yang diukur melalui 5 (lima) Indikator, menghasilkan capaian 4 (empat) indikator sesuai/melampaui target dan 1 (satu) indikator di bawah target.
3. Misi 3 : Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun, Tujuan 1 : Peningkatan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun yang lebih baik tercapai dengan Sangat Baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 2 (dua) Sasaran yang diukur melalui 2 (dua) indikator, menghasilkan capaian 2 (dua) indikator sesuai target.
4. Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun, Tujuan 1 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun tercapai dengan Kurang Baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 3 (tiga) Sasaran yang diukur melalui 7 (tujuh) indikator, menghasilkan capaian 3 (tiga) indikator sesuai/melampaui target dan 4 (empat) indikator capaiannya di bawah target.
5. Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun, Tujuan 2 : Peningkatan Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif tercapai dengan Sangat Baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 2 (dua) Sasaran yang diukur melalui 3 (tiga) indikator, menghasilkan capaian 2 (dua) indikator di atas target dan 1 (satu) indikator di bawah target.



Terdapat 24 (dua puluh empat) indikator sasaran pembangunan Pemerintah Kota Madiun sebanyak 15 (lima belas) indikator sasaran sesuai/melampaui target dan 9 (sembilan) Indikator Sasaran tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 9 (sembilan) Indikator Sasaran indikator tersebut terutama di misi 4 yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun Hal ini akibat dampak pandemi Covid-19 terutama terhadap perekonomian di Kota Madiun. Meskipun demikian untuk indikator ICOR dan Indeks Kerukunan melampaui target yang telah ditetapkan. Perubahan harga minyak dunia, ekspor menurun sejalan dengan kontraksi ekonomi global, sementara konsumsi rumah tangga dan investasi menurun sejalan dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengurangi aktivitas ekonomi masyarakat, kenaikan harga kebutuhan pokok dan hal-hal lain yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan penduduk.

Dari gambaran di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa capaian tersebut sudah merupakan capaian yang cukup menggembirakan di tengah merebaknya pandemi Covid-19, tetapi meskipun demikian Pemerintah Kota Madiun telah melakukan upaya-upaya agar capaian kinerjanya menjadi lebih baik terutama pada capaian indikator sasaran yang belum memenuhi target



P BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Kepala Daerah menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Pejabat publik dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah dengan menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja.



Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa kinerja merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Sedangkan Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan kinerja dihasilkan oleh suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing entitas pelaporan.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020 merupakan capaian kinerja yang disusun dan disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Madiun Tahun 2020, yang penyusunannya berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, Rencana Kinerja Tahun 2020 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kota Madiun merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kota Madiun.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Madiun tahun 2020 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Kota Madiun dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.



Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Madiun adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kota Madiun dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder (Presiden, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kota Madiun.

Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Pemerintah Kota Madiun untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Madiun;
2. Menjadikan Pemerintah Kota Madiun yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Madiun guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kota Madiun terhadap penyelenggara Pemerintah Kota Madiun.

C. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kota Madiun sebagai salah satu wilayah pemerintahan daerah dibawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mempunyai letak yang strategis karena menjadi perlintasan transportasi darat utama antar provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah di pulau Jawa.

Dengan topografi tanahnya yang datar maka Kota Madiun mudah dilalui oleh alat transportasi bus maupun kereta api serta alat transportasi darat lainnya. Hal ini diperkuat dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur, yang menetapkan Kota Madiun sebagai pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Jawa Timur bagian barat.

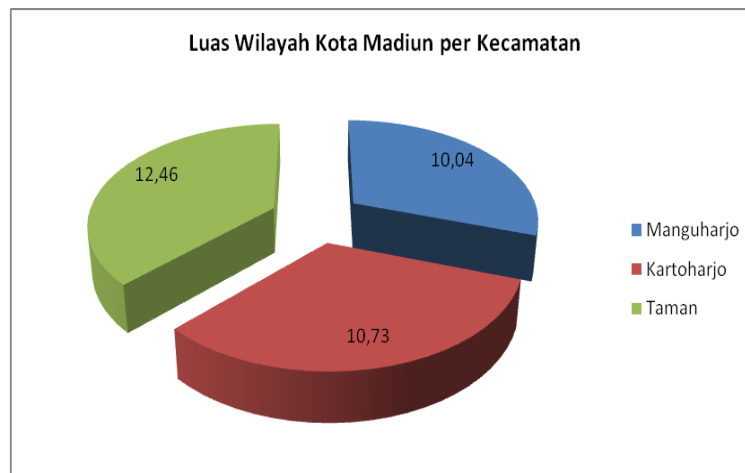
Gambar I.1. Peta wilayah Kota Madiun



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Madiun dengan Kabupaten Madiun dan Batas Daerah Kota Madiun dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, disebutkan bahwa Kota Madiun terletak pada 1110 BT – 1120 BT dan 70 LS – 80 LS, dengan batas-batas meliputi sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan sebelah barat Kota Madiun berbatasan dengan Kecamatan Jiwana Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

Kota Madiun mempunyai luas wilayah sebesar 33,23 km² yang terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan, yaitu meliputi Kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04 km², Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km² dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73 km². Pada masing-masing kecamatan terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan, sehingga total di Kota Madiun terdapat 27 Kelurahan.

Gambar I.2. Luas wilayah Kota Madiun per Kecamatan



Sumberdata : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Madiun

Berdasarkan ketinggian di atas permukaan laut (dpl) atau elevasi, Kecamatan Manguharjo berada pada 76 m dpl, Kecamatan Taman 77 m dpl, dan Kecamatan Kartoharjo 68 m dpl.

2. Kondisi Demografis

Dari aspek demografi, berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2020 sebanyak 209.950 jiwa, tersebar di tiga kecamatan dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 102.751 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 107.199 jiwa. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 72.750 KK.



Rincian jumlah penduduk Kota Madiun per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1. Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Manguharjo	30.771	32.113	62.884
2	Taman	43.761	45.637	89.398
3	Kartoharjo	28.219	29.449	57.668
	Jumlah	102.751	107.199	209.950

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Sedangkan rincian data jumlah penduduk Kota Madiun berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada grafik berikut.

Tabel I.2. Data Penduduk Kota Madiun Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	6.218	5.927	12.145
2.	5-9	7.085	6.778	13.863
3.	10-14	7.765	7.543	15.308
4.	15-19	8.530	7.972	16.502
5.	20-24	8.006	7.650	15.656
6.	25-29	7.171	7.268	14.439
7.	30-34	6.913	6.926	13.839
8.	35-39	8.262	8.297	16.559
9.	40-44	8.448	8.534	16.982
10.	45-49	7.875	7.788	15.663
11.	50-54	6.858	7.405	14.263
12.	55-59	5.828	6.779	12.607
13.	>60	13.792	18.332	32.124
	JUMLAH	102.751	107.199	209.950

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun



Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0 - 14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 - 64 tahun. Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk Kota Madiun paling banyak berada pada kelompok umur diatas 60 tahun yaitu sebanyak 32.124 jiwa. Sedangkan untuk usia produktif (usia 15-54 tahun) ada 123.903 jiwa, yang terbanyak dari kelompok usia 40-44 tahun yakni 16.982 jiwa diikuti kelompok usia 35-39 tahun yaitu sebanyak 16.559 jiwa. Terkait struktur penduduk, piramida penduduk Kota Madiun termasuk dalam kategori ekspansif dimana sebagian besar penduduknya berada dalam kelompok umur muda. Dasar piramida yang cukup lebar menunjukkan penduduk Kota Madiun memiliki angka rasio ketergantungan penduduk muda yang cukup tinggi, sementara puncak piramida yang menciut tajam menunjukkan rendahnya angka rasio ketergantungan penduduk tua.

Sementara itu, menurut tingkat pendidikan sampai dengan akhir Tahun 2020 menunjukkan bahwa penduduk terbesar Kota Madiun merupakan tamat SLTA, yaitu sebesar 73.004 jiwa. Tabel berikut juga memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kota Madiun yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SLTA lebih sedikit, diantaranya tamat D-I/II 503 jiwa; D-III 5.919 jiwa; S-1 20.561 jiwa; S-2 1.420 jiwa, dan S-3 39 jiwa. Secara lengkap, jumlah penduduk Kota Madiun menurut tingkat pendidikan tahun 2016 s/d 2020 dapat dilihat dalam table berikut :



**Tabel I. 3. Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2016 s/d 2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk Berdasarkan Pendidikan :					
Belum Sekolah;	31.740	32.430	31.258	31.374	32.594
Tidak Tamat SD;	18.695	18.755	19.575	19.887	19.748
Tamat SD;	32.318	30.919	30.169	29.266	28.165
Tamat SLTP;	30.342	29.836	29.487	28.787	27.997
Tamat SLTA;	70.756	71.494	72.405	73.045	73.004
Tamat D-I/II;	439	452	468	498	503
Tamat D-III;	5.557	5.566	5.639	5.761	5.919
Tamat S-1;	18.929	19.065	19.431	20.071	20.561
Tamat S-2;	1.238	1.268	1.334	1.391	1.420
Tamat S-3.	23	24	31	35	39
TOTAL	210.037	209.809	209.797	210.115	209.950

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Sedangkan jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan tahun 2020 menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel I. 4. Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan
Tahun 2016 s/d 2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan :					
1. Belum/Tidak Bekerja	35.539	38.358	36.721	36.390	37.270
2. Mengurus Rumah Tangga	35.328	34.773	34.965	34.412	34.227
3. Pelajar/Mahasiswa	45.352	44.032	45.119	44.940	43.596
4. Pensiunan	6.399	6.270	6.237	6.095	6.028
5. PNS	7.396	7.204	6.992	6.826	6.655
6. TNI	1.942	1.830	1.806	1.771	1.731
7. POLRI	1.057	1.039	1.040	1.027	1.029
8. Jasa	9.105	8.951	8.449	8.449	8.522
9. Karyawan	43.735	43.557	44.679	46.311	47.191
10. Buruh	4.690	4.578	4.489	4.390	4.316
11. Wiraswasta	19.060	18.826	18.945	18.994	19.117
12. Lain-lain	434	391	355	510	268

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun (November 2020)



Berdasarkan jenis pekerjaannya, terlihat bahwa sebagian besar penduduk di Kota Madiun bekerja pada sektor swasta. Jumlah penduduk Kota Madiun pada tahun 2020 yang bekerja menjadi karyawan adalah sebanyak 43.557 orang, PRT sebanyak 34.773 orang, dan buruh sebanyak 4.578 orang. Dengan posisi Kota Madiun sebagai kota jasa dan perdagangan di bagian barat Provinsi Jawa Timur, maka penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta jumlahnya cukup banyak yaitu 18.826 orang dan yang bekerja di sektor jasa sebanyak 8.951 orang. Sementara itu, penduduk yang bekerja pada sektor publik baik menjadi PNS maupun anggota TNI/Polri secara keseluruhan adalah sebanyak 10.073 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 7.204 orang, anggota TNI sebanyak 1.830 orang, dan anggota Polri sebanyak 1.039 orang.

3. Kondisi Makro Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan pada kedudukan, fungsi dan peranan Kota Madiun sebagai sub sentra pengembangan Wilayah Jawa Timur di bagian barat, luas wilayah yang relatif kecil, serta dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki, Kota Madiun lebih menitikberatkan pengembangan pada sektor perdagangan dan jasa, baik jasa pendidikan, kesehatan, jasa keuangan dan jasa-jasa lainnya. Sektor-sektor itulah yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Nilai pertumbuhan ekonomi didapatkan dari perhitungan pertumbuhan (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB di suatu wilayah. Terdapat dua jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi adalah dengan melihat data tentang pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan



PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Sedang PDRB atas dasar harga konstan dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar yakni tahun 2010, perhitungan ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan data PDRB atas dasar harga konstan ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

Adapun perkembangan PDRB di Kota Madiun mulai tahun 2014 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I.5. Perkembangan PDRB Atas Dasararga Berlaku dan Konstan Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB (Rp)	
	ADHB	ADHK
2020**	13.767.237,2	10.254.393,8
2019	14.208.213,5	10.635.464,3
2018	13.150.858,7	10.053.582,4
2017	12.140.200,5	9.486.136,6
2016	11.185.109,4	8.954.697,1

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Madiun

****) Angka Sangat Sementara*



Tabel I.6. PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Kota Madiun

Kategori		2016	2017	2018	2019	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,31	-1,78	1,78	-0.94	11.50
B	Pertambangan dan Penggalian	1,91	2,31	1,07	2.41	-5.65
C	Industri Pengolahan	7,21	8,00	7,01	4.64	-12.84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,86	4,91	5,45	6.69	1.98
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,82	6,84	4,44	4.52	4.86
F	Konstruksi	4,44	5,57	2,03	4.90	-4.71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,11	5,83	7,54	6.20	-10.83
H	Transportasi dan Pergudangan	7,13	8,18	8,48	9.11	-4.38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,30	7,47	9,23	8.86	-7.98
J	Informasi dan Komunikasi	6,64	6,77	5,34	4.58	16.12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,11	3,88	4,08	4.79	-1.50
L	Real Estate	5,64	4,22	3,57	5.96	0.33
M,N	Jasa Perusahaan	5,94	6,34	5,31	6.1	-3.18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan SosialWajib	3,05	2,46	4,48	3.85	-2.23
P	Jasa Pendidikan	5,14	4,50	4,21	7.65	1.97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,85	5,93	7,38	7.52	9.98
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,17	4,14	5,74	6.92	-10.68
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,90	5,93	5,98	5.69	-3,38

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Madiun

***Angka Sementara*

Pandemi Covid19 memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pertumbuhan ekonomi secara nasional dan daerah, demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun.



Kondisi ini mengharuskan Pemerintah Pusat maupun Daerah harus harus bekerja lebih keras untuk mengendalikan merebaknya wabah dan bergerakinya roda perekonomian, kesehatan masyarakatnya menjadi prioritas tetapi perekonomian juga harus tetap tumbuh, seperti proses kelahiran, ibu dan anak keduanya harus diselamatkan.

Periode April sampai dengan Juni merupakan waktu yang berat bagi kinerja ekonomi di wilayah manapun seiring dengan masih merebaknya wabah Covid19 termasuk Kota Madiun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun Tahun 2020 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 13,767 triliun. Dalam periode yang sama, PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 10,254 triliun. Secara nominal, nilai PDRB atas dasar harga berlaku mengalami penurunan sebesar 3,10% jika dibandingkan terhadap PDRB Tahun 2019. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat mengakibatkan sepi pengunjung hotel dan restoran. Selain itu, kebijakan belajar di rumah juga berdampak pada sepi usaha penyediaan kamar kos bagi mahasiswa/pelajar.

Jika ditinjau struktur perekonomian Kota Madiun Tahun 2020, pergerakan lapangan usaha masih didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, yaitu Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (24,05% dari total PDRB), Informasi dan Komunikasi (15,91% dari total PDRB), Industri Pengolahan (14,75% dari total PDRB), dan Jasa Keuangan dan Asuransi (10,24% dari total PDRB). Dibandingkan periode sebelumnya, posisi distribusi PDRB terjadi pergeseran dari kategori lapangan usaha Industri Pengolahan di posisi kedua mulai tergeser oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yang sebelumnya pada posisi ketiga. Pergeseran tersebut sangatlah wajar mengingat kebutuhan komunikasi utamanya internet pada masa pandemi dengan berbagai regulasi yang ada, untuk sarana komunikasi serta informasi meningkat tajam. Sementara itu lapangan usaha Industri pengolahan mengalami tekanan akselerasi yang cukup tinggi di seluruh subkategori kecuali industri pengolahan tembakau terakselerasi akibat kenaikan tarif cukai hasil tembakau, serta meningkatnya produksi pada industri kimia dan farmasi.



Secara umum, kinerja ekonomi Kota Madiun Tahun 2020 tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya. Pelemahan ekonomi Kota Madiun bersumber dari pelemahan daya beli masyarakat akibat penurunan sebagian besar kegiatan usaha. Penerapan PSBB dan terbatasnya aktivitas produksi serta konstruksi.

Untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah eks Karesidenan Madiun yang meliputi Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, dan Kota Madiun, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selama kurun waktu 2016-2020 selalu lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah tersebut. Data tersebut mengindikasikan bahwa Kota Madiun merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Provinsi Jawa Timur. Data mengenai pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota eks Karesidenan Madiun ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel I.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Wilayah Karesidenan Madiun Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020**
Kota Madiun	5,91	5,93	5,96	5,69	-3,38
Madiun	5,27	5,42	5,10	5,42	
Magetan	5,30	5,09	5,25	5,04	
Ngawi	5,21	5,07	5,26	5,05	
Pacitan	5,21	4,98	5,51	5,08	
Ponorogo	5,29	5,10	5,31	5,01	

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Madiun

***)Angka Sangat Sementara*

Gambar I.4. Pertumbuhan Ekonomi di Kota Madiun dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2020

PERTUMBUHAN EKONOMI (q to q)

	KOTA MADIUN (q to q)	PROV (q to q)	NASIONAL (q to q)
TW 1 2019	0,15	0,13	-0,52
TW 2	2,61	3,54	4,2
TW 3	2,33	3,52	3,06
TW 4	-0,86	-1,68	-1,74
TW 1 2020	-2,65	-2,2	-2,41
TW 2	-2,71	-5,45	-4,19
TW 3	Belum rilis	5,89	5,05
TW 4	Belum rilis	-0,94	-2,19

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Madiun

a. Indeks Pembangunan Manusia

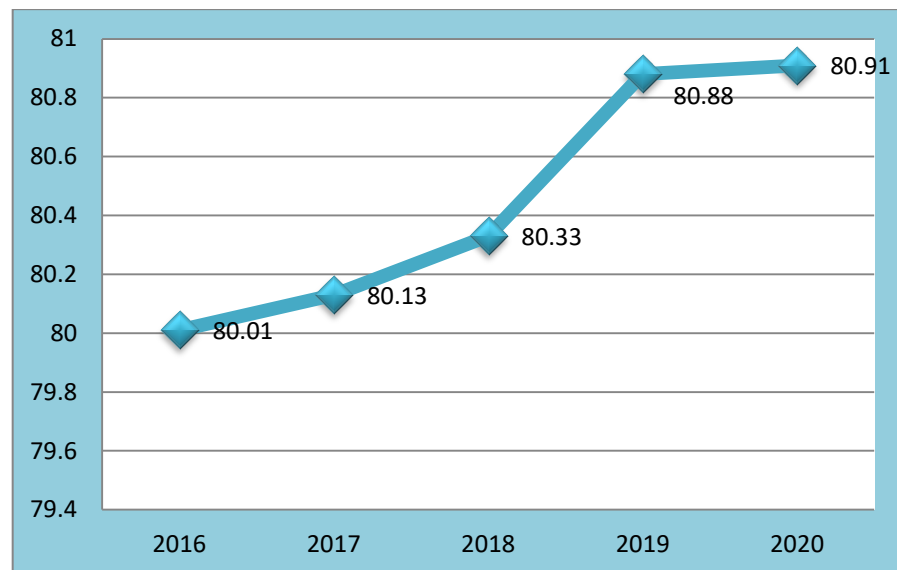
Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Adapun perkembangan IPM di Kota Madiun Tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagaimana tabel berikut.

Gambar I.8. Perkembangan IPM Kota Madiun 2016-2020



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Madiun

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun sebagaimana tersaji dalam grafik diatas menunjukkan tren yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, IPM Kota Madiun baru mencapai angka 80,01.



Angka tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga pada tahun 2020 IPM Kota Madiun sudah mencapai angka 80,91, masih di atas rata-rata tingkat Provinsi yaitu 71,71 maupun Nasional yaitu 71,94.

Hal ini menunjukkan upaya pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Prestasi itu ditunjukkan dari predikat IPM Kota Madiun pada tahun 2020 masih bertahan menjadi IPM berkategori "sangat tinggi". Walaupun demikian, Pemerintah Kota Madiun harus terus-menerus meningkatkan kinerja pembangunan manusianya.

Berikut perkembangan nilai dimensi dasar yang mempengaruhi perkembangan nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kota Madiun.

Tabel I.9 AHH, HLS, RLS dan Paritas Daya Beli

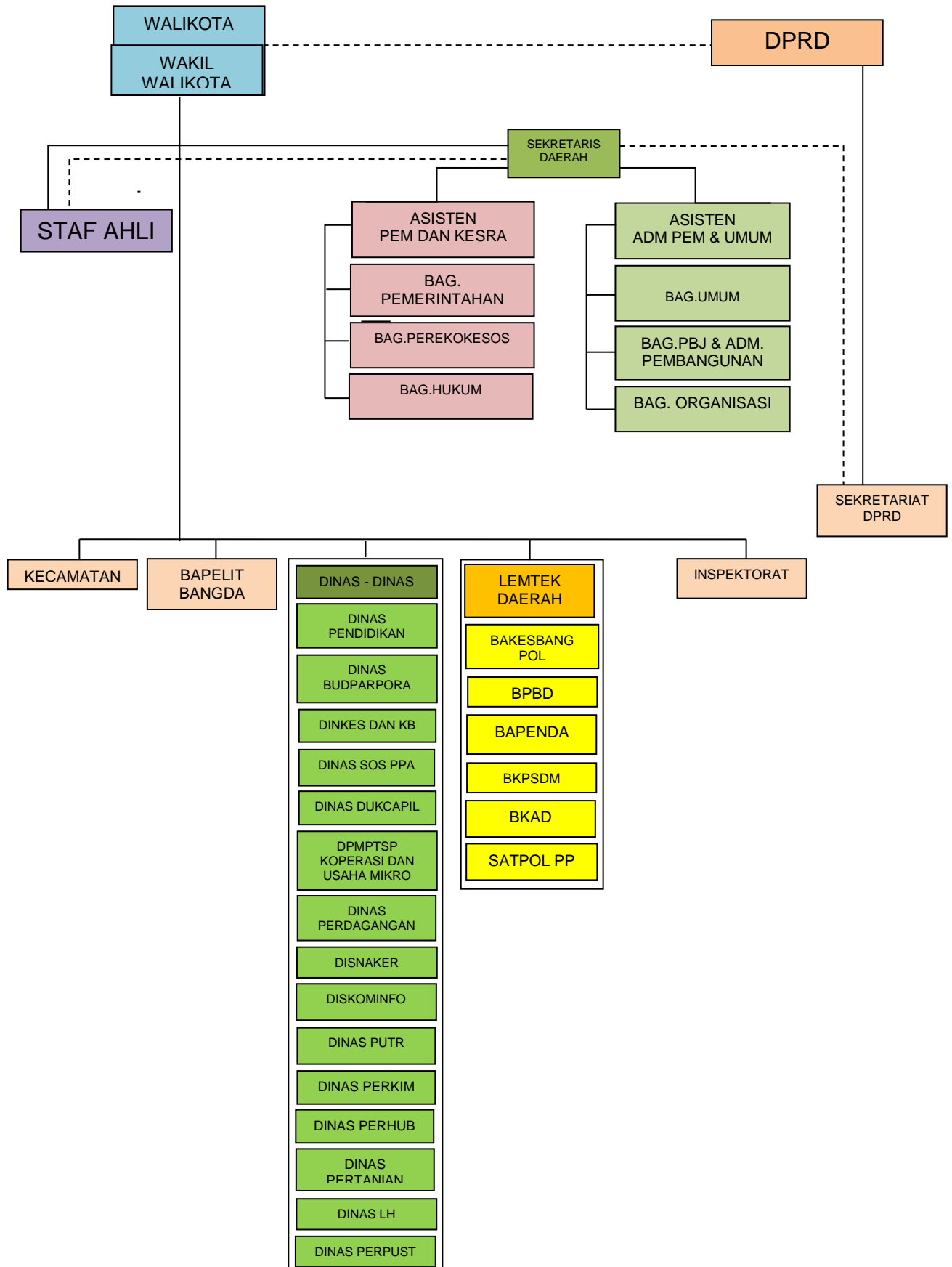
Tahun	Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Paritas Daya Beli
2016	72,44	14,19	11,09	15.300
2017	72,48	14,20	11,10	15.415
2018	72,59	14,21	11,10	15.616
2019*	72,75	14,39	11,13	16.040
2020**	72,81	14,40	11,14	16.018

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Madiun

Berdasarkan tabel di atas bahwa Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mengalami kenaikan tetapi untuk Paritas Daya Beli mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid19 yang menyebabkan masyarakat menekan pengeluaran sehingga daya beli masyarakat menurun.



C. Struktur Organisasi



D Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa mendatang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditentukan tata cara merumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Penentuan Isu Strategis Dokumen RPJMD memiliki jangka menengah 5 (lima) tahun, maka akan dirumuskan isu strategis yang berpotensi muncul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.
2. Pembobotan Setiap isu strategis yang telah ditentukan, akan dilakukan pembobotan untuk menentukan isu strategis yang paling prioritas dan akan menjadi dasar penyusunan visi dan misi . Kriteria dalam penentuan isu strategis didasarkan pada 6 kriteria dengan bobot yang berbeda. Kriteria beserta bobotnya tersebut sebagai berikut:
 - 1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional (bobot: 20 poin)
 - 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah (bobot: 10 poin)
 - 3) Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat (bobot: 20 poin)
 - 4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah (bobot: 10 poin)
 - 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani (bobot: 15 poin)
 - 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan (bobot: 25 poin)

Berdasarkan kriteria beserta bobotnya tersebut, didapatkan hasil pembobotan isu strategis Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Tabel I.10. Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis Kota Madiun Tahun 2019-2024

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria (poin)						Jumlah
		1	2	3	4	5	6	
1.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>)	20	7	20	10	7	10	74
2.	Pengembangan Kota Madiun sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat	20	10	20	10	15	15	90
3.	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	20	10	20	10	10	15	85
4.	Peningkatan Kualitas Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan	20	10	20	10	15	25	100
5.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	20	10	20	10	15	25	100
6.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota	15	7	20	10	10	20	82
7.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota	15	10	15	6	10	20	76
8.	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik	20	10	15	10	15	25	95
9.	Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah	10	10	15	10	7	15	67
10.	Penguatan Pola Pembangunan Partisipatif	10	10	15	10	7	15	67
11.	Percepatan Pengembangan Agroindustri	15	7	20	10	10	20	82

Sumber Data : BAPELITBANGDA Kota Madiun

Isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kota Madiun sesuai dengan urutan pembobotannya yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan;
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
3. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik;



4. Pengembangan Kota Madiun sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat;
5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Percepatan Pengembangan Agroindustri;
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota;
8. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota;
9. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals);
10. Penguatan Pola Pembangunan Partisipatif;
11. Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah.

F. Sistematika

Sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Madiun Tahun 2016 menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Uraian tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Gambaran Umum Daerah (Kondisi Geografis, Kondisi Demografis dan Kondisi Ekonomi), Struktur Organisasi, isu strategis, serta inovasi yang telah dikembangkan Pemerintah Kota Madiun.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar perjanjian kinerja, pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020 meliputi RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020.



BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Uraian tentang capaian kinerja Pemerintah Kota Madiun tahun 2020, sesuai dengan sasaran strategis dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, meliputi pengukuran kinerja, perkembangan realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran, evaluasi dan analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja, serta realisasi keuangan.

BAB IV : PENUTUP

Uraian tentang kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Madiun tahun 2020 dan memberikan rekomendasi yang mungkin untuk dilakukan sebagai upaya perbaikan kinerja di masa mendatang

LAMPIRAN - LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Penyusunan RENSTRA atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Madiun tahun 2019-2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Madiun merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Madiun.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perencanaan yang matang, berbasis data yang akurat, maka diharapkan dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat, efektif dan efisien guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.



A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Madiun, merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi, misi dan agenda Walikota sebagaimana yang disampaikan kepada masyarakat dan para wakil rakyat di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional. RPJMD Kota Madiun memuat gambaran umum kondisi Kota Madiun, gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, isu-isu strategis dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas, penetapan indikator kinerja daerah, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019–2024 ini tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan pada periode waktu sebelumnya dari berbagai rangkaian dan periodisasi kepemimpinan daerah sesuai dengan penekanan dan tema yang didasarkan pada berbagai perspektif, kondisi dan perkembangan pembangunan saat itu. Untuk itulah maka penyusunan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 disusun dengan strategi ***keberlanjutan*** yaitu dengan prinsip tetap memperhatikan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode kepemimpinan sebelumnya yang telah memberikan sejumlah hasil dan capaian pembangunan kesejahteraan sosial, ekonomi bagi masyarakat.

Salah satu instansi yang berwenang dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun yang berkewajiban meningkatkan pembangunan disegala bidang dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menyusun perencanaan ini, sehingga terwujud satu kesatuan perencanaan yang dapat berjalan sesuai dengan keputusan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Visi

Berdasarkan pada gambaran dan analisa kondisi eksisting dan tantangan makro yang dihadapi dalam kurun waktu 20 tahun mendatang serta potensi wilayah yang dimiliki dan dapat untuk lebih dikembangkan, maka ditetapkan visi Kota Madiun dalam RPJPD tahun 2005 – 2025 dan selanjutnya berdasarkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditetapkan visi pembangunan jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II.1 Visi RPJPD dan RPJMD

PERIODE	VISI
RPJPD 2005-2025	Terwujudnya Kota Madiun Sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat yang Maju dan Sejahtera
RPJMD 2019-2024	Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera
Keterkaitan RPJPD dengan RPJMD	Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera Melalui Optimalisasi Peran Kota Madiun Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Dalam dokumen ini dijabarkan pengertian atau makna dari maju dan sejahtera. Makna “Kemajuan” berkaitan dengan kondisi yang terus-menerus berkarya dengan dilandasi falsafah bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini. Pengertian maju secara sederhana antara lain mencakup bidang IPOLEKSOSBUD, melalui peningkatan indikator ekonomi, indikator kesehatan, indikator pendidikan, dan penerapan indikator *goodgovernance*.



Makna “Sejahtera” berhubungan dengan kemajuan Kota Madiun di segala aspek kehidupan yang harus mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya. Ukuran dasar kesejahteraan yang mencakup pemenuhan kebutuhan pokok (*basic need*) berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan yang terdistribusi secara proporsional dan adil dalam seluruh struktur dan lapisan masyarakat. Persoalan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kesejahteraan ditangani secara komprehensif dan proporsional. Semua anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, dapat menyatakan pendapat dan aspirasinya secara demokratis dan memperoleh perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Aspek kesejahteraan disini mencakup juga aspek batiniah dan religiusitas yang secara operasional tercermin dalam kerukunan umat beragama dan perilaku yang dilandasi budi pekerti luhur dalam pergaulan hidup keseharian warga masyarakat.

Visi yang telah ditetapkan tersebut akan tercapai dengan cara mewujudkannya pada 4 (empat) elemen kehidupan kota yaitu Pemerintahan, Masyarakat, Swasta, dan Lingkungan. Pemerintahan dikatakan sejahtera apabila pemerintahan tersebut telah mampu memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar para pegawainya. Untuk masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang segala kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, perwujudannya adalah rendahnya angka kemiskinan dan pengangguran. Kesejahteraan swasta dapat tercapai apabila ditandai dengan peningkatan pendapatan atau laba dari hasil usaha ekonominya dan terwujudnya persaingan yang sehat. Lingkungan yang sejahtera adalah lingkungan yang tata ruangnya mampu mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan mendukung kelestarian alam dan keanekaragaman hayati.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Sebagai penjabaran atas visi tersebut, dirumuskan misi selama masa jabatan 2014-2019 sebagai berikut :

Tabel II.2 Visi dan Misi RPJMD

VISI : "Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera"	
M I S I	1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)
	2. Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan
	3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun
	4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun

Berbagai misi dan orientasi pembangunan tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan, yang akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan pada setiap tahunnya. Untuk mengimplementasikan keseluruhan tersebut diperlukan strategi pembangunan yang tepat, berdasarkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal yang ada pada tahun awal perencanaan.

3. Tujuan Pembangunan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari misi atau orientasi pembangunan atau sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pembangunan Kota Madiun secara umum. Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kota Madiun, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan bertitik tolak pada arah misi atau orientasi pembangunan, tujuan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel II.3 Visi, Misi dan Tujuan RPJMD

Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju dan Sejahtera		
NO	MISI	TUJUAN
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Terwujudnya Pemerintahan yang Baik
2	Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan
3	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun	Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Berkualitas Baik
4	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun	1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemeratakan Kesejahteraan Masyarakat 2. Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif

4. Sasaran Pembangunan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Madiun selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Tabel II.4 Target Kinerja Sasaran Akhir RPJMD

Terwujudnya Pemerintahan yang Baik			
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2020
1.1.1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	3,1000 (sangat tinggi)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 (baik)
		Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	3,16 (baik)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	BB (70,01)
1.1.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Opini BPK	WTP
1.1.3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	14,81% (4 kelurahan)
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	83,25



Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan				
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target Akhir RPJMD 2020
2.1.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, transportasi kota dan permukiman	Kualitas sarana kota dan	Indeks Sarana-prasarana Permukiman	86,62
			Kinerja ruas jalan	0,44
			Indeks Infrastruktur	96
2.1.2	Meningkatnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kualitas Ruang dan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,04
			Persentase ruang yang dimanfaatkan RTRW	100%

Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Berkualitas Baik				
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target Akhir RPJMD 2020
3.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Kota Madiun	Indeks Kesehatan		0,81
3.1.2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Kota Madiun	Indeks Pengetahuan		0,77

Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat				
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target Akhir RPJMD 2020
4.1.1	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif, dan peningkatan penyerapan tenaga kerja	ICOR		2,55
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		3,8
4.1.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan sektor perdagangan		5,91
		Pertumbuhan sektor pengolahan		7,30
		Pertumbuhan sektor pariwisata		8,70



Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat			
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2020
4.2.1	Stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Rasio Ketersediaan Pangan Utama dan Konsumsi Pangan	1,03
		Indeks Gini	0,35

Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif			
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2020
4.2.1	Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi	Indeks Kerukunan	2,77 (tinggi)
		Prestasi pemuda dan olahraga ditingkat regional dan nasional	33
4.2.2	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Indeks rasa aman	76

B. Perjanjian Kinerja

RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, selanjutnya dijabarkan secara bertahap dalam rencana kinerja tahunan yang memuat target kinerja tahunan dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Target kinerja yang telah ditetapkan tersebut beserta dengan alokasi anggaran masing-masing program dan kegiatan yang mendukungnya, selanjutnya dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Besaran target kinerja yang ditetapkan untuk dicapai dalam tahun 2020 sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Madiun tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	3	4	5
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	3.1000 (Sangat Tinggi)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 (BAIK)
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,16 (BAIK)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	BB (70,01)
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	OPINI BPK	WTP
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Persentase Kelurahan yang Mendapatkan Klasifikasi Swasembada	14,81% (4 Kelurahan)
		Indeks Pemerdayaan Gender	83,25
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Sarana Transportasi Kota dan Permukiman	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	86,62
		Indeks Infrastruktur	96
		Kinerja Ruas Jalan	0,44
5	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,04
		Persentase Ruang yang dimanfaatkan RT RW	100
6	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	0,81
7	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun	Indeks Pengetahuan	0,77



1	3	4	5
8	Meningkatnya kualitas Iklim Investasi yang Kondusif, dan meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	ICOR	2,55
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,8
9	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan Sektor Perdagangan	5,91
		Pertumbuhan Sektor Pengolahan	7,3
		Pertumbuhan Sektor Pariwisata	8,7
10	Meningkatnya stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Rasio Ketersediaan Pangan Utama dan Konsumsi Pangan	1,03
		Indeks Gini	0,35
11	Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi	Indeks Kerukunan	2,77 (Tinggi)
		Prestasi Pemuda dan Olahraga di Tingkat Regional dan Nasional	33
12	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Indeks Rasa Aman	76

No	Program	Anggaran
1	2	3
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	68,936,242,531.00
2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	15,743,867,765.00
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15,415,222,496.00
4	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,996,315,720.00
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	271,710,240.00
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	700,064,000.00
7	Program Pendidikan Dasar	109,914,621,423.21

1	2	3
---	---	---



8	Program Pendidikan Anak Usia Dini	4,871,668,580.00
9	Program Pendidikan Non Formal	756,210,250.00
10	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan	40,956,734,250.00
11	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	5,119,104,352.00
12	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4,402,858,000.00
13	Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	24,186,569,000.00
14	Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	2,496,224,440.00
15	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan	6,736,432,925.00
16	Program Peningkatan Kinerja BLUD	79,919,849,200.00
17	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	4,81,304,400.00
18	Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota	16,409,899,492.51
19	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	60,122,281,636.60
20	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong	14,632,155,835.45
21	Program Pengendalian Banjir	35,150,000,000.00
22	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	860,268,560.00
23	Program Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman	2,116,404,000.00
24	Program Pengelolaan RTH, PJU dan Permakaman	17,496,173,700.00
25	Program Pelayanan Pertanahan	116,650,000.00
26	Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	296,770,000.00
27	Program Pembinaan, Penertiban dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1,823,792,000.00
28	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	302,785,000.00
29	Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1,249,050,000.00
30	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1,555,252,000.00
31	Program Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	3,571,172,790.00



1	2	3
32	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	2,398,466,160.00
33	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial	9,056,651,684.00
34	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	404,778,540.00
35	Program Perlindungan dan Pengembangan Kelembagaan KetenagaKerjaan	1,132,147,000.00
36	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan	-
37	Program Ketrasmigrasian	20,194,480.00
38	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	468,644,382.00
39	Program Pembinaan Industri	41,523,000.00
40	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	482,786,000.00
41	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	790,827,800.00
42	Program Penuaan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	395,301,760.00
43	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6,479,697,000.00
44	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	269,148,240.00
45	Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	1,406,409,920.00
46	Program Pengelolaan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan	344,664,400.00
47	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	4,053,146,880.00
48	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	2,146,576,080.00
49	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	494,696,000.00
50	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	9,770,223,900.00
51	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	5,666,145,354.00
52	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	258,887,000.00



1	2	3
53	Program Sosialisasi di Bidang Cukai	1,599,000,000.00
54	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Ralisasi Investasi	267,067,400.00
55	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	494,726,528.00
56	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	682,828,000.00
57	Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	1,111,900,000.00
58	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	1,711,966,000.00
59	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	2,030,306,480.00
60	Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata	916,103,060.00
61	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	986,623,980.00
62	Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah	457,608,480.00
63	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	961,257,000.00
64	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	204,682,500.00
65	Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah	563,832,720.00
66	Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	568,019,440.00
67	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	695,550,680.00
68	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	878,475,800.00
69	Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	2,666,914,000.00
70	Program Stabilisasi Ekonomi Daerah	256,489,600.00
71	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	100,000,000.00
72	Program Peningkatan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	564,831,560.00



1	2	3
73	Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	106,603,000.00
74	Program Layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat	18,594,407,724.00
75	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian	227,368,400.00
76	Program Fasilitasi Kesejahteraan PNS	102,680,000.00
77	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1,064,452,450.00
78	Program Penataan Aparatur	311,317,600.00
79	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	1,910,378,390.00
80	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1,039,911,000.00
81	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	719,692,000.00
82	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah	249,300,000.00
83	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	4,826,894,040.00
84	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah	417,900,000.00
85	Program Peningkatan Manajemen Pajak Daerah	457,163,500.00
86	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1,443,283,000.00
87	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	383,238,000.00
88	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Sisdur Pengawasan	6,000,000.00
89	Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,104,842,400.00
90	Program Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya	370,355,040.00
91	Program Perencanaan Fisik dan Sarana Prasarana Kota	526,585,440.00
92	Program Pengembangan Kajian dan Penelitian	217,359,280.00
93	Program Penyelenggaraan Kelurahan	16,314,981,300.00
94	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketertarikan Umum	416,119,686.00



1	2	3
95	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	692,742,446.00
96	Program Dana Kelurahan	17,311,450,000.00
97	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	475,516,930.00
98	Program Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial	844,531,160.00
99	Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Orkemas	209,320,015.00
100	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	718,143,250.00
101	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	2,598,709,515.00
102	Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	385,721,660.00
103	Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	511,783,300.00
104	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat	977,561,660.00
105	Program Pengelolaan Pasar Rakyat	5,356,278,240.00
106	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	50,000,000.00
	JUMLAH	660,097,390,708.41



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima pelaporan.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Madiun tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

A. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1) Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel III.1 Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

No	Kriteria Pengukuran	Predikat
1	$X \geq 100 \%$	Sangat Baik
2	$85 \% \leq X < 100 \%$	Baik
3	$60 \% \leq X < 85 \%$	Cukup Baik
4	$X < 60 \%$	Kurang Baik

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

- (1) **Tingkat Realisasi Positif** yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- (2) **Tingkat Realisasi Negatif** yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2) Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019 disajikan sebagai berikut :

Tabel III.2 Pengukuran Realisasi Kinerja 2020

Misi 1 : Mewujudkan pemeritahan yang baik (good governance)					
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.1.1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Sangat tinggi (3.1)	Sangat tinggi (3.385)	109,19%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 (BAIK)	85,501 (BAIK)	103%



Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,16 (BAIK)	2,82 (BAIK)	89,24%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	BB (70,01)	B(68,20)*	97,41%
1.1.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100%
1.1.3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Persentase Kelurahan yang Mendapatkan Klasifikasi Swasembada	14,81% (4 Kelurahan)	18,50% (5 Kelurahan)	124,92%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	83.25	77,07*	92,58%

Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
2.1.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Sarana Transportasi Kota dan Permukiman	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	86,62	87,12	100,58%
		Indeks Infrastruktur	96	96,15	100,16%
		Kinerja Ruas Jalan	0,44	0,38	113,64%
2.1.2	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,04	65,42	100,58%
		Persentase Ruang yang dimanfaatkan RTRW	100%	100%	100%



Misi 3 : Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
3.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Kota Madiun	Indeks Kesehatan	0,81	0,81	100%
3.1.2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun	Indeks Pengetahuan	0,77	0,77*	100%

Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
4.1.1	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja	ICOR	2,55	-0,91	235,86%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,8	8,32	-18,95%
4.1.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan sektor perdagangan	5,91	-11,18*	-189,17%
		Pertumbuhan sektor pengolahan	7,3	-12,84*	-175,89%
		Pertumbuhan sektor Pariwisata	8,7	-7,98*	-91,72%
4.3	Stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Rasio ketersediaan pangan utama dan konsumsi pangan	1,03	1,38	134%
		Indeks Gini	0,35	0,346	101,43%
4.4	Meningkatnya kerukunan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan pemuda yang berprestasi	Indeks Kerukunan	2,77 (TINGGI)	3,70	133,57%
		Prestasi Pemuda dan Olahraga ditingkat regional dan nasional	33	79	239%



Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
4.5	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Indeks Rasa Aman	76	76,05	100,07%

Sumber Data : Bappeda Kota Madiun dan BPS

*) Angka Sangat Sementara

3) Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja

Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 disajikan sebagai berikut :

1. Misi Pertama : *Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*

Tujuan Pertama : *Terwujudnya Pemerintahan yang Baik*

Tabel III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2019 (n-1)	2020 (n)
1.1.1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Sangat Tinggi (3.1250)	Sangat tinggi	Sangat tinggi (3.385)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 (BAIK)	88,45 (BAIK)	85,501 (BAIK)



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2019 (n-1)	2020 (n)
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,96 (BAIK)	2,82* (BAIK)	2,82* (BAIK)
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	BB (70,01)	B(68,20)*	B(68,20)*
1.1.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	WTP
1.1.3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Persentase Kelurahan yang Mendapatkan Klasifikasi Swasembada	62,96% (17 Kelurahan)	3,7% (1 kelurahan)
			18,50% (5 kelurahan)	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	84,56	77,07
				77,07*

Sumber Data : Bappeda Kota Madiun dan BPS

*Angka Sementara

Tabel III.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Periode RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD
1.1.1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	3.1250	3.385
				108,32%



Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 (BAIK)	85,501 (BAIK)	98,28%
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,96 (BAIK)	2,82* (BAIK)	71,97%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	A (80,01)	B(68,20)*	85,24%
1.1.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100%
1.1.3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Persentase Kelurahan yang Mendapatkan Klasifikasi Swasembada	62,96% (17 kelurahan)	18,50%* (5 kelurahan)	29,41%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	84,56	77,07	91,14%

Sumber Data : Bappeda Kota Madiun dan BPS

*Data Tahun 2019

Tabel III.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Provinsi 2020	Realisasi Nasional 2020
1.1.1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Sangat Tinggi (3.385)	Sangat Tinggi	N/A



Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Provinsi 2020	Realisasi Nasional 2020
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,501 (BAIK)	81,33* (BAIK)	N/A
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,82 (BAIK)*	2,25 (BAIK)*	N/A
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	B (68,20)*	A	N/A
1.1.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	N/A
1.1.3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Persentase Kelurahan yang Mendapatkan Klasifikasi Swasembada	62,96% (17 kelurahan)	N/A	N/A
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,07	71,71	-

Sumber Data : Bappeda Kota Madiun

**Angka Sementara*

Pada Misi 1 Tujuan 1 dan Sasaran 1 terdapat 4 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kota Madiun meraih nilai 3,3850 dengan predikat Sangat Tinggi. Hal ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang memperoleh nilai 3,3056. Sedangkan di Tahun 2018 yang memperoleh nilai 3,2399 dan Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat dan status kinerja



penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak ditampilkan (N/A, Not Available). Dan di Tahun 2016 3,2055. Capaian kinerja indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Madiun adalah 100%. Hal ini merupakan bukti adanya komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dengan mengedepankan profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabel, dalam ruang lingkup pengukuran kinerja atas kinerja makro pembangunan, kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan serta akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah yang merupakan capaian atas perjanjian kinerja Kepala Daerah, juga terhadap penerapan Standart Pelayanan Minimal. Adapun Nilai EKPPD Pemerintah Kota Madiun eriode 2016 sampa dengan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel III.6. Tabel Nilai EKPPD tahun 2016-2019

NO	TAHUN	PERINGKAT	SKOR	STATUS
1.	2016	5	3,2055	Sangat Tinggi
2.	2017	N/A	-	-
3.	2018	25	3,2399	Sangat Tinggi
4.	2019	7	3,3056	Sangat Tinggi
5.	2020	-	3,3850	Sangat Tinggi

Sumber Data : Bagian Administrasi Pemerintahan

Upaya yang dilakukan dalam rangka mempertahankan pencapaian target kinerja indikator Nilai EKPPD antara lain :

- 1) Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan penyusun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah se-Pemerintah Kota Madiun ;
- 2) Melaksanakan desk pencermatan Indikator Kinerja Kunci (IKK) ;
- 3) Adanya pendampingan penyusunan IKK baik oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maupun akademisi
- 4) Melakukan Monev pencapaian IKK secara berkala

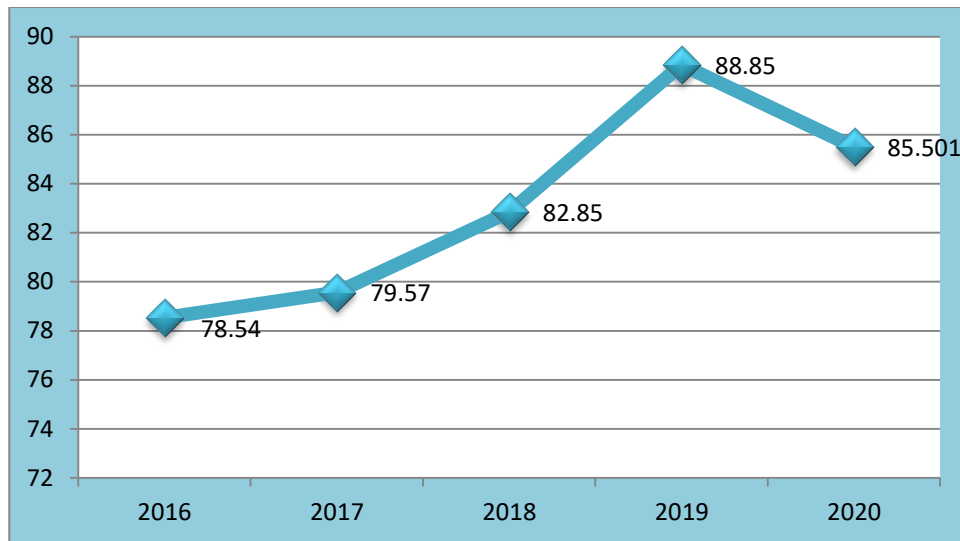


2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka menjaga kepercayaan dari masyarakat, salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Survey Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survey Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survey yang telah ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dari hasil atas Survey Kepuasan Masyarakat akan dibuat suatu penelitian dengan menggunakan analisis statistik atau metode tertentu. Dari hasil penelitian ini diperoleh tingkat kepuasan masyarakat terhadap masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Sehingga dapat diketahui kekurangan dari masing-masing unit tersebut yang kemudian dapat diperoleh saran perbaikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

Pada tahun 2020, berdasarkan hasil survey pada beberapa perangkat daerah dan unit kerja, diperoleh nilai sebesar 85,501, menurun dari tahun sebelumnya tahun 2019 yaitu 88,45. Namun demikian Nilai tersebut telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2019 yaitu sebesar 83, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 103,01%. Perkembangan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Gambar III.1 Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Madiun tahun 2016-2020



Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kota Madiun

Trend Indeks Kepuasan Masyarakat mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan, sedangkan di Tahun 2020 terdapat penurunan nilai yang dikarenakan kondisi nasional yaitu adanya pandemi Covid-19 sehingga terdapat perubahan sistem pelayanan dan penyesuaian dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan survey yang dilakukan secara online. Namun Pemerintah Kota Madiun melaksanakan langkah-langkah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pelayanan publik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terutama di bidang pelayanan. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi pelayanan publik terhadap seluruh unit pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
2. Melakukan evaluasi ketatalaksanaan terhadap seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
3. Melakukan pendampingan unit pelayanan publik oleh praktisi terkait inovasi pelayanan publik

4. Melaksanakan dan mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Madiun, Tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Tingkat Nasional
5. Pemberian penghargaan kepada unit pelayanan publik yang berprestasi
6. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat sehingga hasilnya lebih akurat
7. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan Survey Evaluasi Pelayanan Publik untuk F03 bagi penerima layanan sehingga hasilnya lebih akurat
8. Melaksanakan Sertifikasi ISO/SNI bagi Unit Pelayanan Publik (tahun 2020 telah dilaksanakan sertifikasi ISO di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Madiun) bekerja sama dengan BSN dan Pihak Ketiga.

Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kota Madiun mendapatkan sertifikasi SNI ISO 9001:2015 Manajemen Mutu dan SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuaan.





3. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE. pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE.

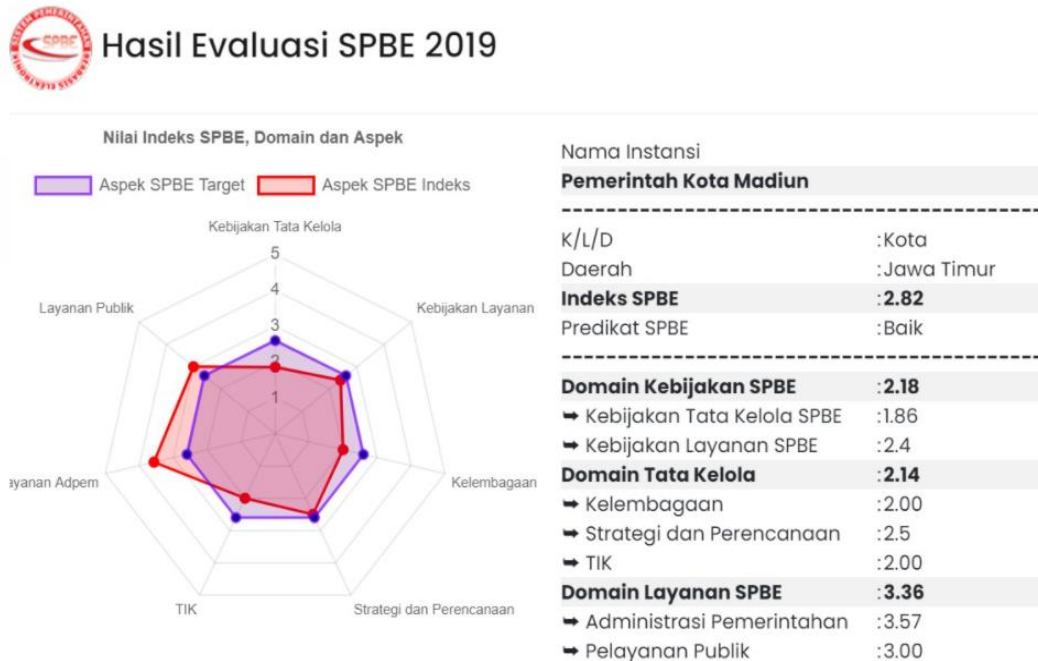
Upaya yang sudah dilakukan dalam rangka mencapai tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE adalah :

1. Melakukan pengintegrasian sistem e-government;
2. Pengelolaan website Pemerintah Kota secara terintegrasi;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publikasi informasi ke masyarakat;
4. Menjalin kerjasama dan hubungan yang lebih harmonis dengan media massa dan instansi terkait;
5. Menyediakan layanan publik berbasis Teknologi Informasi;
6. Menyediakan saluran informasi dan komunikasi yang memadai bagi masyarakat berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan Pemerintah Kota;
7. Mengoptimalkan PPID;
8. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder masyarakat;

Perlu disampaikan berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Evaluasi SPBE Tahun 2020 bersama dengan Jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Perguruan Tinggi, segenap Undangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun pada hari Selasa Tanggal 23 Juni 2020 bahwa untuk penilaian Indeks SPBE Tahun 2020 dikarenakan dengan adanya pandemi Covid-19 diutamakan untuk Daerah atau Kabupaten/Kota yang Indeks SPBE nya masih bernilai rendah, sehingga untuk tahun 2020 ini Pemerintah Kota Madiun tidak dilakukan evaluasi SPBE

Adapun hasil SPBE Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Gambar III.2 Hasil Evauasi SPBE Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019



Sumber Data : Dinas Kominfo

4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Madiun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan kategori hasil penilaian SAKIP adalah sebagai berikut :



No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan
	A	>80 - 90	Memuaskan , memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
	BB	>70 - 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal
	B	>60 -70	Baik , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja
	CC	>50 -60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
	C	>50 -60	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
	D	>50 -60	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

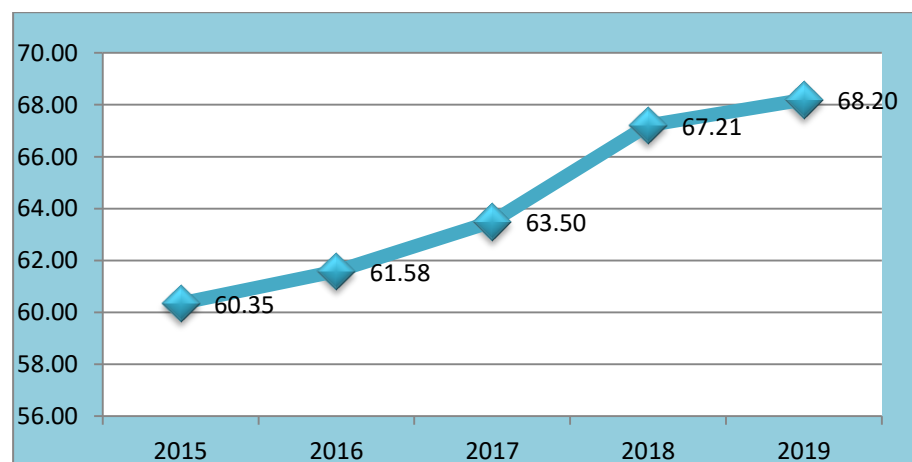
Adapun komponen-komponen penilaian SAKIP yaitu :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15 %
4. Evaluasi Internal dengan bobot 10%
5. Capaian Kinerja dengan bobot 20%

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : B/657/AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, hasil evaluasi Pemerintah Kota Madiun mendapatkan nilai 68,20. Secara umum perkembangan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

"Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun" selama kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut sejak tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 capaian kinerjanya mengalami kenaikan namun secara kategori nilai akuntabilitas Pemerintah Kota Madiun masih tetap bernilai B.

Gambar III.3 Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kota Madiun tahun 2015-2019

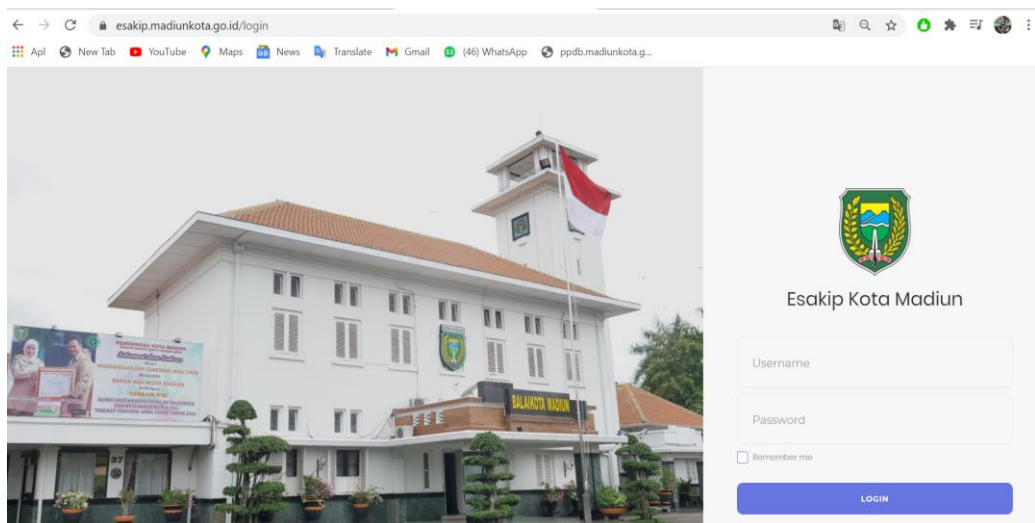


Sumber Data : Kementerian PAN dan RB

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerjanya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penetapan RPJMD dan Penetapan RENSTRA Perangkat Daerah
2. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja pada Perangkat Daerah mulai dari Kepala Perangkat Daerah sampai dengan Pelaksana dan penandatanganan Perjanjian Kinerja
3. Melakukan penyusunan RENSTRA Tahun 2019-2024 dengan pendekatan yang menggambarkan tingkat keberhasilan yang ingin dicapai dan keterkaitan dengan sasaran RPJMD serta tupoksi, untuk penyusunan lebih lanjut sesuai regulasi, bersamaan dengan review RPJMD dan RENSTRA tentang implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang berlaku secara serentak bagi pemerintah daerah.
4. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan Cascading Perangkat Daerah Tahun 2019-2020
5. Perencanaan penganggaran untuk kedepan akan difokuskan pada prioritas pencapaian tujuan dan sasaran
6. Melakukan restrukturisasi e saki yang diintegrasikan dengan e planning (Sistem Perencanaan Pemerintah Daerah), sikd (Sistem Informasi Keuangan Daerah), simonev (Sistem Informasi Evaluasi dan Pengendalian)

Gambar III.4 Aplikasi esakip.madiunkota.go.id



The screenshot shows a web application interface for performance reporting. On the left is a dark sidebar menu with various report categories. The main content area has a filter form with dropdowns for 'Perangkat Daerah' and 'Tahun', and an 'Aktifkan Filter!' button. Below the form is a table with columns: 'Organisasi Perangkat Daerah', 'Visi', 'Misi', 'Tujuan', and 'Indikator Tujuan'. The table lists 11 organizations, each with green checkmarks in the last four columns, indicating successful performance.

Organisasi Perangkat Daerah	Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	✓	✓	✓	✓
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	✓	✓	✓	✓
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓	✓	✓	✓
BADAN PENDAPATAN DAERAH	✓	✓	✓	✓
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	✓	✓	✓	✓
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	✓	✓	✓	✓
BAGIAN HUKUM	✓	✓	✓	✓
BAGIAN ORGANISASI	✓	✓	✓	✓
BAGIAN PEMERINTAHAN	✓	✓	✓	✓
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	✓	✓	✓	✓
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	✓	✓	✓	✓

7. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan LKj Perangkat Daerah Tahun 2019 yang dilaporkan Tahun 2020, dengan penekanan pada analisis terhadap capaian kinerja serta rencana aksi/tindak lanjut tahun berikutnya, cascading dan peta proses bisnis Perangkat daerah
8. Meningkatkan kapasitas evaluator dengan akan dilakukannya BIMTEK bagi evaluator, melakukan pendampingan dengan Inspektorat Provinsi/ Biro Organisasi, dan study tiru ke daerah lain

Pada Misi 1 Tujuan 1 dan Sasaran 2 terdapat 1 indikator dengan capaian keberhasilan yaitu :

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini BPK diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan secara periodik terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Madiun tahun 2020 yang mencakup pemeriksaan terhadap

1. Laporan Realisasi Anggaran,
2. Laporan perubahan saldo akhir kas,
3. Neraca,

4. Laporan operasional,
5. Laporan perubahan ekuitas,
6. Laporan Arus Kas, dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Predikat tersebut telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2020. Realisasi atas target kinerja yang ditetapkan menunjukkan hasil yang sangat baik. Adapun opini BPK mulai tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel III.7. Hasil Capaian Opini BPK Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Opini	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber Data : BKAD Kota Madiun

Adapun strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun untuk mempertahankan Opini BPK yaitu :

1. Penguatan komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan para pelaksana kegiatan
2. Optimalisasi koordinasi internal dan eksternal dalam proses penyusunan anggaran, penyusunan pelaporan keuangan dan penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan asset daerah dengan melaksanakan penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan peningkatan monitoring dan evaluasi
3. Penguatan perencanaan dan penganggaran
4. Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran
5. Peningkatan kualitas laporan keuangan melalui pembinaan, sosialisasi dan bimbingan secara berkala tentang tata kelola keuangan dan pelaporan keuangan



6. Peningkatan kualitas proses pengadaan barang/jasa
7. Peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah
8. Meningkatkan ketersediaan peraturan, kebijakan, system operasional prosedur, mekanisme, petunjuk pelaksana maupun petunjuk teknis dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran maupun pengawasan terhadap penggunaan anggaran
9. Peningkatan kualitas pengawasan dan reviu atas Laporan Keuangan
10. Percepatan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Pada Misi 1 Tujuan 1 dan Sasaran 3 terdapat 2 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan ditetapkan bahwa analisis terhadap klasifikasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan swasembada, swakarya dan swadaya yang menghasilkan klasifikasi status kemajuan desa dan kelurahan dalam kategori mula, madya dan lanjut.

Klasifikasi status kemajuan Swasembada dikategorikan dalam 3 (tiga kategori) yaitu :

- 1) Kategori Mula, apabila perolehan total skor variabel ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat kurang dari 90% dari total skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun.
- 2) Klasifikasi status kemajuan Swasembada Kategori Madya, jika perolehan total skor variabel keamanan dan ketertiban, kedalulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan dan lembaga kemasyarakatan mencapai kurang dari 90% dari total skor maksimal keempat variabel selama lima tahun.



- 3) Klasifikasi status kemajuan Swasembada Kategori Lanjut, apabila perolehan total skor variabel kinerja pemerintahan desa dan kelurahan serta variabel pembinaan dan pengawasan mencapai kurang dari 90% dari total skor maksimal kedua variabel selama lima tahun.

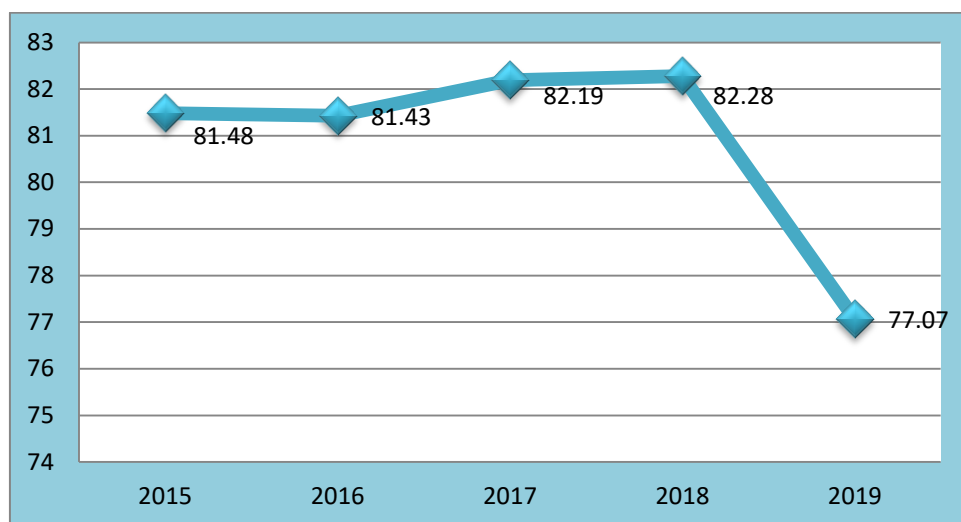
Di tahun 2020 ini capaian kinerja dari indikator Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada berdasarkan data sementara adalah 5 (lima) kelurahan atau 18,50 lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 14,81% yaitu 4 (empat) kelurahan.

Hal tersebut tidak terlepas dari pembinaan teknis dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat di masing-masing wilayah yang meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan pendanaan dalam anggaran kelurahan untuk penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan;
 - b. memfasilitasi pembentukan kelompok kerja profil kelurahan di tingkat kelurahan dan kecamatan;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi serta pendayagunaan data dasar keluarga, data potensi kelurahan serta data tingkat perkembangan kelurahan di wilayah kecamatan;
 - d. memfasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data profil kelurahan di tingkat kecamatan;
 - e. melakukan upaya percepatan penyediaan data profil desa dan kelurahan tingkat kelurahan dan kecamatan; dan
 - f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pendayagunaan data profil kelurahan di tingkat kecamatan.
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Nilai indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, untuk tahun 2015 sebesar 81,48, tahun 2016 sebesar 82,43, tahun 2017 sebesar 82,19 sedangkan untuk tahun 2018 sebesar 82,28 dan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 77,07.

Hal ini disebabkan salah satunya persentase anggota dewan perempuan yang tidak sampai 30% dari total anggota dewan. Akan tetapi secara umum peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Madiun diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan perkembangan yang semakin baik.

Gambar III.4. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Madiun tahun 2015-2019



Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka mencapai IDG Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai pembangunan yang dilakukan melalui strategi :

- a. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan melalui sosialisasi maupun pembinaan ;
- b. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai program dan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;



- c. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender melalui sosialisasi maupun pembinaan kepada masyarakat maupun dunia usaha.

Kedua, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan yang dilakukan melalui strategi:

- a. Peningkatan pemahaman tentang tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan melalui sosialisasi maupun pembinaan ;
- b. Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan ;
- c. Peningkatan efektivitas pelayanan bagi perempuan korban kekerasan.

Ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Dengan strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan yang antara lain untuk :

- a. Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender ;
- b. Pelaksanaan *review* dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan agar berspektif gender ;
- c. Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka penanganan tindak kekerasan ;
- d. Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha dalam penerapan PUG ;
- e. Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat ;
- f. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah ;
- g. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG.

2. Misi Kedua : *Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan*

Tujuan Pertama : *Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan*

Tabel III.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2019 (n-1)	2020 (n)
2.1.1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur, Sarana Transportasi Kota dan Permukiman	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	94	82,23	87,12
	Indeks Infrastruktur	97	96,03	96,15
	Kinerja Ruas Jalan	0,44	0,44	0,38
2.1.2 Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,10	63,87	65,42
	Persentase Ruang yang dimanfaatkan RTRW	100%	100%	100%

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup

Tabel III.9 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Periode RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD
2.1.1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur, Sarana Transportasi Kota dan Permukiman	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	94	87,12	92,68%
	Indeks Infrastruktur	97	96,15	99,12%
	Kinerja Ruas Jalan	0,44	0,38	113,64%



Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD
2.1.2	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,10	65,42	98,56%
		Persentase Ruang yang dimanfaatkan RTRW	100%	100%	100%

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup

Tabel III.10. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Provinsi 2020	Realisasi Nasional 2020
2.1.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Sarana Transportasi Kota dan Permukiman	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	87,12	-	-
		Indeks Infrastruktur	96,80	-	-
		Kinerja Ruas Jalan	0,38	-	-
2.1.2	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,42	65,09*	-
		Persentase Ruang yang dimanfaatkan RTRW	100%	-	-

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup

*)Angka sementara

Pada Misi 2 Tujuan 1 dan Sasaran 1 terdapat 3 indikator keberhasilan yaitu :

1. Indeks Sarana Prasarana Permukiman

Capaian Indeks Sarana Prasarana Permukiman tahun 2020 adalah sebesar 87,12 angka ini masih bersifat sementara karena masih dalam proses finalisasi penghitungan, sedangkan target yang ditetapkan di tahun 2020 adalah sebesar 86,62.

Perhitungan Indeks Sarana Prasarana Permukiman yaitu rata-rata dari Indeks Perumahan dan Permukiman dengan Indeks Pengelolaan RTH, PJU dan Permakaman.

- 1) Indeks Perumahan Permukiman meliputi rata-rata persentase Rumah Tinggal Layak Huni, Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi dan Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU
- 2) Indeks Pengelolaan RTH, PJU dan Permakaman meliputi perhitungan rata-rata Indeks Pengelolaan RTH yang dikelola kondisi baik, Persentase Penerangan Jalan Lingkungan yang dikelola dan persentase Peningkatan Fasilitas Permakaman

1.1 Perhitungan indeks perumahan permukiman

Tabel III.11. Capaian Kinerja Indeks Perumahan Permukiman 2019-2020

NO	INDIKATOR	2019	2020		CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN
		REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Indeks Perumahan Permukiman	99,65	99,53%	99,65%	100,12%	Sangat baik

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman



$$\begin{aligned} & (\text{Prosentase Rumah tinggal layak Huni} + \text{Prosentase Rumah Tinggal Bersanitasi} + \text{Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU})/3 \\ & = (99,95\% + 99,00\% + 100\%)/3 \\ & = \mathbf{99,65\%} \end{aligned}$$

1. Prosentase rumah tinggal layak huni

$$= \frac{\text{Jumlah Rumah Tinggal Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah Tinggal Seluruh Kota}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} & = \frac{42.308}{42.329} \times 100\% \\ & = \mathbf{99,95\%} \end{aligned}$$

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum mencapai target dalam kurun waktu 2015-2017 karena mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak ada program bantuan RTLH. Hal tersebut disebabkan adanya peraturan baru mengenai Hibah dan Bansos sehingga baru tahun 2018 program bantuan RTLH tersebut dilaksanakan. Setelah dilakukan verifikasi pada tahun 2020 didapatkan sebanyak 115 rumah yang berhak menerima Bansos RTLH.

2. Prosentase rumah tinggal bersanitasi

$$= \frac{\text{Jumlah Rumah tinggal yang sudah terlayani MCK/Septic Tank}}{\text{Jumlah Rumah tinggal seluruh kota}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} & = \frac{41.906}{42.329} \times 100\% \\ & = \mathbf{99,00\%} \end{aligned}$$

Sanitasi dalam suatu rumah tinggal merupakan kebutuhan dasar yang harus ada yang mana merupakan salah satu indikator rumah tinggal tersebut dikategorikan rumah sehat. Dari hasil updating perumahan didapatkan rumah tinggal yang bersanitasi sebanyak 41.906 unit dan 2020 ini penerima bansos jambanisasi berjumlah 38 penerima bantuan.

3. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu}} \times 100\% \\ &= \frac{38}{38} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

A.2 Indeks Pengelolaan RTH, Penerangan Jalan dan Permakaman

Tabel III.12. Capaian Kinerja Indeks Pengelolaan RTH, Penerangan Jalan dan Permakaman 2019-2020

NO	INDIKATOR	2019	2020		CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN
		REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Indeks Pengelolaan RTH, Penerangan Jalan dan Permakaman	71,74%	73,70%	74,59%	101,20%	Baik

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa capaian kinerja belum mencapai target dikarenakan adanya beberapa kegiatan/pekerjaan fisik yang mengalami refocusing anggaran untuk covid-19 terutama pada pembangunan RTH, Penyediaan PJU dan Pembangunan Pagar Makam. Adapun perhitungan dari Indeks Pengelolaan RTH, PJU dan Permakaman meliputi :

$$\begin{aligned} &(\text{Prosentase RTH yang dikelola kondisi baik} + \text{Prosentase Penerangan Jalan Lingkungan Yang dikelola} + \text{Prosentase Peningkatan Fasilitas Permakaman})/3 \\ &= (98,45\% + 48,22\% + 77,11\%)/3 \\ &= \mathbf{74,59\%} \end{aligned}$$



1. **Prosentase RTH yang dikelola kondisi baik**

$$= \frac{\text{RTH yang dikelola kondisi baik}}{\text{RTH yang dikelola}} \times 100\%$$

Proyeksi RTH yang dikelola

$$= \frac{55,92}{95} \times 100\%$$

56,8

$$= \mathbf{98,45\%}$$

2. **Prosentase Penerangan Jalan Lingkungan Yang dikelola**

$$= \frac{\text{Penerangan Jalan Lingkungan Yang Tersedia}}{\text{Kebutuhan Penerangan Jalan Lingkungan}} \times 100\%$$

Kebutuhan Penerangan Jalan Lingkungan

$$= \frac{6002}{12.448} \times 100\%$$

12.448

$$= \mathbf{48,22\%}$$

3. **Prosentase Peningkatan Fasilitas Permakaman**

$$= \frac{64}{83} \times 100\%$$

83

$$= \mathbf{77,11\%}$$

$$\mathbf{\text{Indeks Sarana Prasarana Permukiman} = (99,65\% + 74,591\%)/2}$$

$$= (174,24)/2$$

$$= \mathbf{87,12\%}$$

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja indikator Sarana Prasarana Permukiman antara lain :

- 1) Perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan pembuatan data/kajian perumahan dan RTH
- 2) Penyediaan perumahan
- 3) Pemeliharaan dan perbaikan perumahan
- 4) Perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan pembuatan data/kajian permukiman
- 5) Penyediaan sarana dan prasarana permukiman

- 6) Pemeliharaan dan perbaikan permukiman
- 7) Perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan pembuatan data/kajian
- 8) Pembangunan RTH dan fasilitas pendukungnya
- 9) Pemeliharaan dan perbaikan RTH dan fasilitas pendukungnya
- 10) Penyediaan penerangan jalan umum
- 11) Pemeliharaan dan perbaikan penerangan jalan umum
- 12) Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
- 13) Pemeliharaan dan Perbaikan Pemakaman

2. Kinerja Ruas Jalan

Kinerja ruas jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk melayani kebutuhan arus lalu lintas sesuai dengan fungsinya yang dapat diukur dan dibandingkan dengan standar tingkat pelayanan jalan. Nilai tingkat pelayanan jalan dijadikan sebagai parameter kinerja ruas jalan. Kinerja jalan juga ditentukan oleh derajat kejenuhan ruas jalan. Dengan demikian maka semakin kecil nilainya maka kinerjanya lebih baik.

Adapun kinerja ruas jalan di kota madiun diwakili oleh rata-rata kinerja 10 (sepuluh) ruas jalan kolektor primer yang ada di lingkup Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2020 yaitu 0,38, adapun secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.13. Kapasitas dan Volume Ruas Jalan

NO	NAMA RUAS	KAPASITAS (smp/jam)	VOLUME (smp/jam)	V/C
1	Jl. Panglima Sudirman	3575	1588	0,44
2	Jl. Mastrip	3622	1773	0,49
3	Jl. Kolonel Marhadi	3692	1118	0,30
4	Jl. Cokroaminoto	3510	1446	0,41
5	Jl. Musi	3442	1373	0,40
6	Jl. Agus Salim	3118	957	0,31
7	Jl. Dr. Sutomo	3466	1431	0,41
8	Jl. Diponegoro	3081	1261	0,41
9	Jl. Slamet Riyadi	3121	966	0,31
10	Jl. Ringroad	3657	1065	0,29
RATA-RATA			1297,8	0,38

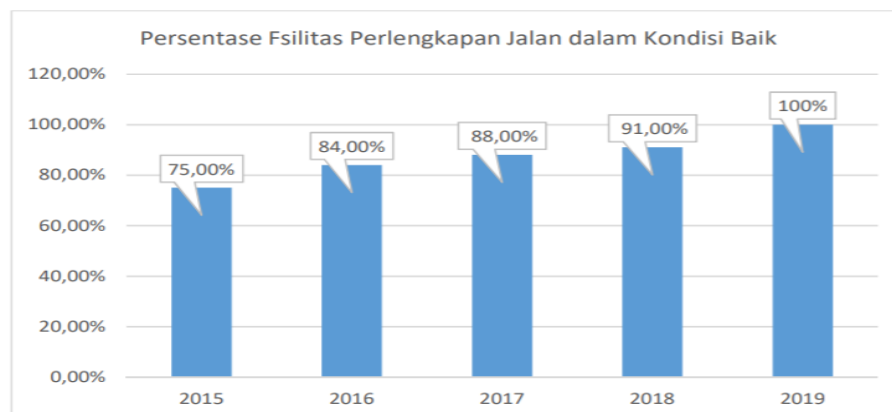
Sumber Data : Dinas Perhubungan

Seperti dilihat pada tabel diatas kinerja indikator tahun 2020 lebih baik daripada sedangkan tahun 2019 sebesar 0,45, hal ini selain didukung oleh kinerja Dina Perhubungan Kota Madiun jg disebabkan oleh adanya pandemi Covid19 yang membuat menurunnya aktivitas masyarakat.

Upaya-upaya yg dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja ruas jalan adalah dengan melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan penataan parkir on street, melakukan sosialisasi baik online di media sosial maupun secara langsung kelapangan.

Kinerja ruas jalan juga dipengaruhi oleh perlengkapan jalan yang representatif. Dimana setiap pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas kan membutuhkan perlengkapan jalan sesuai kebutuhan hasil analisa teknis Berikut adalah persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik.

Gambar III.5 : Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik



Sumber Data : Dinas Perhubungan

3. Indeks Infrastruktur

Capaian indikator Indeks Infrastruktur Pemerintah Kota Madiun untuk Tahun 2020 adalah 96,15 sehingga realisasi tahun 2020 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 96 dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,15 %. Indikator ini diukur berdasarkan persentase realisasi layanan infrastruktur yang berupa gedung, jalan maupun saluran dibandingkan dengan jumlah infrastruktur yang tersedia.

Faktor pendorong yang mempengaruhi tercapainya Indeks Infrastruktur Kota Madiun adalah :

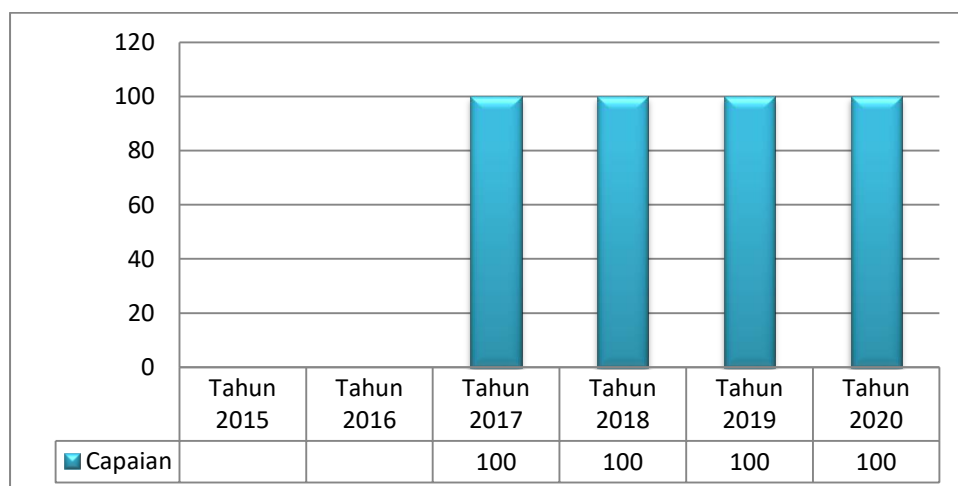
- 1) Adanya keinginan masyarakat agar sarana dan prasana perkotaan yang representatif
- 2) Adanya aplikasi yang memudahkan pengaduan masyarakat sehingga segera dapat ditangani

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain :

- 1) Kurangnya tenaga teknis yang berkompeten di bidang infrastruktur
- 2) Kurang optimalnya kinerja sumber daya manusia penyedia dalam proses penyelesaian proyek tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak.

Berikut ini meningkatnya kualitas pembangunan gedung dan bangunan tahun 2014 - 2019 :

Gambar III. 6 : Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Bangunan di Kota Madiun



Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tabel III.14 Perkembangan Kondisi Jalan di Kota Madiun dalam Km

Uraian	2019	2020
Kondisi Baik	405,540	407,620
Kondisi Sedang	26,250	21,795
Rusak Ringan	-	2,145
Rusak (Tanah)	1,305	1,925
Panjang Jalan Total	433,095	433,485

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2020 terealisasi lebih besar dari target, hal ini dikarenakan banyaknya pemeliharaan ruas jalan yang ada di Kota Madiun.

Dalam rangka menjaga kondisi jalan yang mantap dan memadai telah dilakukan langkah-langkah pemeliharaan jalan setiap tahun yaitu :

- 1) Kondisi jalan yang baik dilaksanakan dengan sistim pemeliharaan rutin
- 2) Kondisi jalan sedang dilaksanakan dengan pemeliharaan berkala
- 3) Kondisi jalan rusak dilaksanakan sistim pemeliharaan berkala atau peningkatan jalan
- 4) Dukungan anggaran yang disediakan

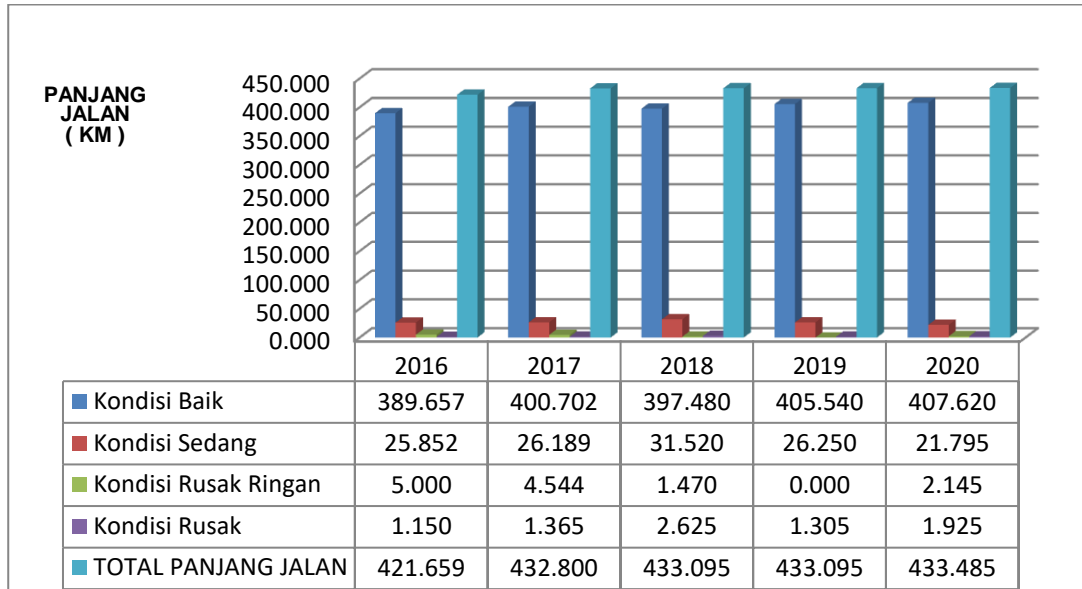
Faktor pendorong tercapainya keberhasilan tersebut dikarenakan adanya kegiatan peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan sebagai berikut :

- Pembangunan bangunan pelengkap jalan sebanyak 39 ruas
- Pemeliharaan berkala jalan paket 1 sebanyak 5 ruas
- Pemeliharaan berkala jalan paket 2 sebanyak 5 ruas
- Pemeliharaan berkala jalan paket 3 sebanyak 5 ruas
- Pemeliharaan berkala jalan paket 4 sebanyak 6 ruas

Panjang jalan Kota pada tahun 2020 adalah 407,620 km atau 94,03 % dalam kondisi baik, 5,04 % dalam kondisi sedang, 0,49 % dalam kondisi rusak ringan dan sisanya sebesar 0,44 % dalam keadaan rusak (tanah).

Untuk informasi lebih rinci kondisi jalan di Kota Madiun sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar III.7 Grafik Kondisi Jalan di Kota Madiun



Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tabel III.15 Kondisi Jalan Di Kota Madiun

NO	TYPE PERKERASAN		KONDISI	JALAN	
				PANJANG RUAS KONDISI JALAN (KM)	PANJANG TYPE JALAN TOTAL (KM)
Jalan Nasional di Kota Madiun					
1	ASPAL	a	Baik	4,295	4,295
		b	Sedang	12,245	12,245
		c	Rusak Ringan	-	-
		d	Rusak Berat	-	-
TOTAL					16,540
Jalan Propinsi di Kota Madiun					
2	ASPAL	a	Baik	-	
		b	Sedang	-	
		c	Rusak Ringan	-	
		d	Rusak Berat	-	
TOTAL					
Jalan Kota di Kota Madiun					
3	ASPAL	a	Baik	407,620	433,485
		b	Sedang	21,795	
		c	Rusak Ringan	2,145	
		d	Rusak Berat	1,925	
TOTAL					450,025

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



Dengan selesainya Kegiatan Pemeliharaan Jalan, maka kegiatan penyelenggaraan jalan sekarang menjadi berubah penekanannya, jalan yang selesai dibangun ataupun setelah dilaksanakan pemeliharaan berkala pada tahun sebelumnya akan mengalami penurunan kondisi sesuai dengan bertambahnya umur sehingga dari jalan kondisi baik menjadi kondisi sedang, kondisi sedang menjadi kondisi rusak ringan dan seterusnya.

Sedangkan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan pada tahun 2019 dilaksanakan pekerjaan penambalan jalan berlubang, pengedukan saluran, pengeprasan bahu jalan, pembersihan trotoar, perbersihan semak disekitar jembatan, pemasangan trotoar keramik pada jembatan, pengecatan leuneng dan kanstin, pembersihan gorong-gorong dengan tujuan untuk mempertahankan kondisi konstruksi dan kelengkapan jalan dan jembatan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas sehingga keselamatan dan kenyamanan lalu lintas pengguna jalan terjamin dan pelayanan kinerja jalan meningkat.

Hal ini dalam rangka :

- a. Memperkecil biaya operasi kendaraan yang dipengaruhi oleh jenis kendaraan, geometrik dan kondisi jalan.
- b. Mencegah kerusakan atau mengurangi laju kerusakan (rate of deterioration) sehingga diharapkan dapat memperpanjang umur rencana.

Dampak positif kegiatan pemeliharaan jalan di Kota Madiun :

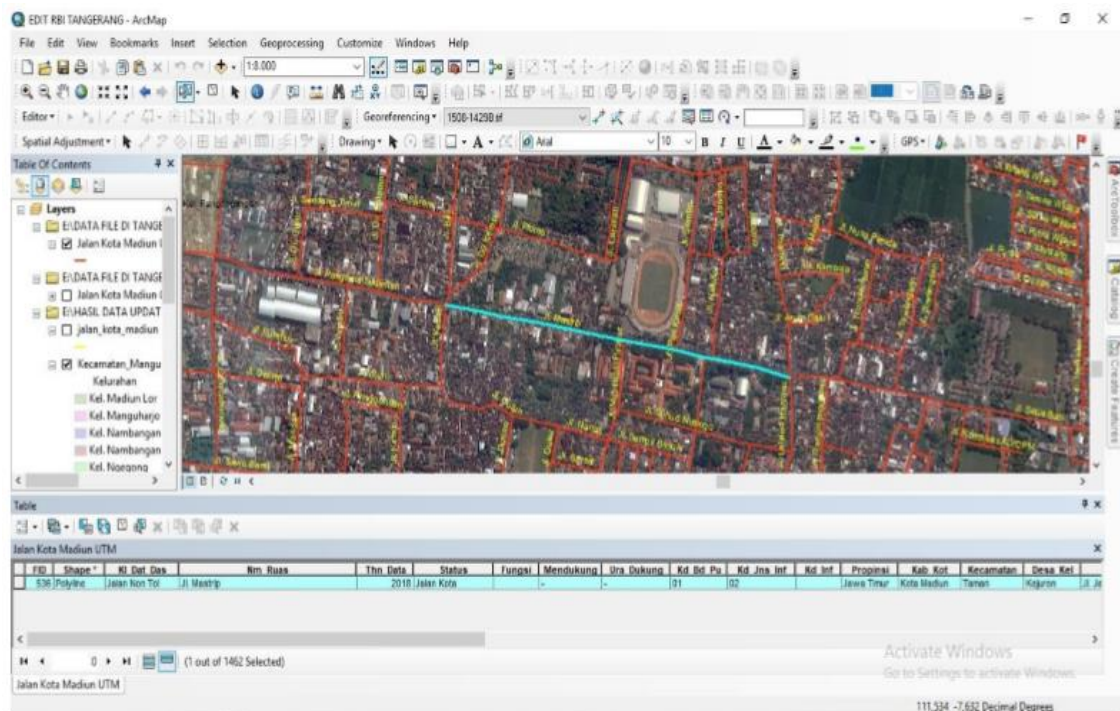
- a. Kelancaran lalu lintas Manfaat langsung dari pemeliharaan jalan baik perkerasan jalan maupun pada bangunan pelengkap jalan adalah meningkatnya kelancaran arus lalu lintas atau angkutan barang dan orang khususnya dalam menghubungkan daerah satu ke daerah lainnya di wilayah Kota Madiun. Dengan semakin lancarnya arus lalu lintas berarti lebih mengefisiensikan waktu dan biaya.
- b. Merangsang tumbuhnya aktivitas perekonomian Manfaat langsung ini terlihat ketika diadakannya kegiatan trotoarisasi yang bebasiskan lantai keramik dengan ditandai tumbuhnya aktivitas perekonomian berupa aktivitas PKL di sekitar trotoar yang selesai dibangun.

- c. Pertumbuhan PDRB daerah Semakin lancarnya transportasi akan menimbulkan dampak pergerakan orang maupun barang. Dengan demikian akan memicu peningkatan jumlah penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk akan merangsang naiknya permintaan barang dan jasa. Selanjutnya akan merangsang meningkatnya kegiatan perekonomian, berkembangnya usaha di sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa dan meningkatnya arus barang masuk ke Kota Madiun

Pada tahun 2020 persentase tersedianya informasi data base jalan sudah terealisasi 100%, dikarenakan seluruh data jalan yang ada di Kota Madiun sudah tercover dalam GIS (Geographic Information System) sehingga tidak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Berikut ini contoh tampilan aplikasi GIS (Geographic Information System) di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun :

Gambar III.8 Geographic Information System



Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



Pada Misi 2 Tujuan 1 dan Sasaran 2 terdapat 2 indikator keberhasilan yaitu :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup yang didasarkan pada data Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas udara, Indeks Kualitas Tutupan lahan. Adapun pembobotan untuk setiap indikator terdiri dari 30 % untuk pencemaran air, 30 % untuk pencemaran udara, dan 40 % untuk tutupan hutan.

IKLH Kota Madiun tahun 2020 dengan realisasi 65,42 melebihi target yang telah ditetapkan 65,04 dan mengalami kenaikan bila dibandingkan IKLH tahun 2019 dengan nilai 63,87 atau naik 1,55.

Kenaikan IKLH Kota Madiun dipengaruhi oleh kenaikan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) sedangkan IKTL berada pada posisi sama dengan tahun lalu.

Kenaikan IKLH Kota Madiun dipengaruhi oleh kenaikan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU).

1) Kenaikan IKA

Hasil perhitungan Indeks Kualitas Air Tahun tahun 2020 sebesar 77,42 sedangkan tahun 2019 sebesar 76,70. Tahun 2020 IKA naik bila dibanding tahun 2019 berarti semakin membaik kualitas airnya dan dari data hasil uji laboratorium air sungai selama setahun menunjukkan bahwa beberapa parameter mengalami kenaikan memenuhi baku mutu.



2) Kenaikan IKU

Kenaikan kualitas udara kota Madiun tahun 2020 dibanding tahun 2019 ini dipicu karena selama tahun 2020 dimasa pandemi banyak aktifitas / kegiatan usaha yang secara tidak langsung berkurang sehingga aktifitas yang mempengaruhi kualitas udara akibat kegiatan industri/usaha semakin baik dan kendaraan-kendaraan masa pandemi banyak yang berkurang beraktifitas karena pembatasan-pembatasan aktifitas juga mempengaruhi kualitas udara. Dengan demikian berimbang pada menurunnya konsentrasi zat pencemar yang ada di udara terutama untuk parameter NOx dan SOx.

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun dalam upaya menjaga kualitas lingkungan di Kota Madiun yaitu :

- a. Dengan makin banyaknya industri maka Dinas Lingkungan Hidup harus lebih sering melakukan monitoring dan evaluasi terhadap industri/industri tersebut mulai dari awal pendirian sampai dengan pelaksanaan operasional kegiatan ;
- b. Sarana dan prasarana sudah banyak di penuhi dan meningkatnya volume sampah dapat ditekan karena banyak berdiri bank-bank sampah baik yang sudah berbadan hukum atau belum, dengan sarana prasarana yang tersedia kinerja meningkat, kerjasama yang baik dengan satgas kebersihan yang masuk ke TPS serta pekerja profesional di TPA yang memilah sampah. Sehingga sampah dari tahun ke tahun yang masuk ke TPA di Winongo dapat di tekan;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan/pelestarian lingkungan hidup maka Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan sosialisasi dan pendekatan serta meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, Dinas terkait dan pihak-pihak yang terkait untuk memberikan yang terbaik berkenaan dengan lingkungan hidup Kota Madiun agar semakin baik dan sehat.



- d. Menghadapi permasalahan adanya badan usaha/instansi yang belum mempunyai dokumen lingkungan maka ditingkatkan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan serta pendekatan kepada pelaku usaha agar segera memiliki dokumen pengelolaan lingkungan sesuai prosedur yang berlaku.
- e. Adanya usaha/kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administratif dan teknis tentang pengelolaan limbah B3. Tahun 2019 sudah banyak yang melakukan koordinasi pada DLH tetapi belum memenuhi persyaratan sehingga akan lebih intensif melakukan pembinaan, sosialisasi dan pemantauan
- f. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas terkait

2. Prosentase Ruang Yang Dimanfaatkan RTRW

Pada pelaksanaan tahun 2020 untuk indikator kinerja sasaran Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW mencapai realisasi 100% dari target 100% dengan capaian sebesar 100%. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsinya sudah dilakukan pengendalian melalui monitoring, pendataan dimana 100% wilayah perkotaan sudah dimanfaatkan.

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2020 adalah :

1. Perlindungan dan Konservasi lingkungan hidup
2. Peningkatan kualitas dan akses informasi lingkungan hidup
3. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
4. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
5. Perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tahun 2020 sebagai Pengendalian Pemanfaatan Ruang khususnya Ruang Terbuka Hijau Privat. Dalam penyelenggaraan tupoksi dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memberikan rekomendasi terkait permohonan pendirian bangunan baru/rehabilitasi.

Dalam hal penyediaan tanah untuk RTH Publik diarahkan/disarankan pada pemenuhan RTH Publik di masing-masing kelurahan melalui pemanfaatan dan penggunaan tanah bengkok yang ada di wilayah Kelurahan masing-masing. Disamping tanah bengkok juga diutamakan pengembang untuk memenuhi RTH

Tabel III.16 Ruang Terbuka Hijau di Kota Madiun

RTH	Luas	Satuan
RTH Jalur Jalan Kota	57,90	Ha
RTH Taman, Monumen, Gerbang Kota	59,62	Ha
RTH Lapangan Olahraga dan Makam	40,61	Ha
RTH Hutan	14,62	Ha
RTH Pengaman Jalur KA, SUTT dan Sungai	120,33	Ha
RTH Privat		
- Lahan Pekarangan	365,52	Ha
- RTH Taman	1,66	Ha
- RTH Jalur Jalan	4,67	Ha
Jumlah Total	664,93	Ha

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

3. Misi Ketiga : *Meningkatnya*

Tujuan Pertama : *Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Kualitas Hidup Masyarakat kota Madiun*

Tabel III.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
				2019 (n-1)	2020 (n)
3.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Kota Madiun	Indeks Kesehatan	0,81	0,81	0,81
3.1.2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun	Indeks Pengetahuan	0,77	0,77*	0,77*

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

**)Angka sangat Sementara*

**Tabel III.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Akhir
Periode RPJMD**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD
3.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Kota Madiun	Indeks Kesehatan	0,81	0,81	100%
3.1.2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun	Indeks Pengetahuan	0,77	0,77*	100%

Sumber Data : *Badan Pusat Statistik*

**)Angka Sementara*

**Tabel III.19. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan
Realisasi Nasional**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Provinsi 2020	Realisasi Nasional 2020
3.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Kota Madiun	Indeks Kesehatan	0,81	-	-
3.1.2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun	Indeks Pengetahuan	0,77*	0,62*	-

Sumber Data : *Badan Pusat Statistik*

**)Angka Sementara*



Pada Misi 3 Tujuan 1 dan Sasaran 1 terdapat 2 indikator keberhasilan yaitu :

1. Indeks Pengetahuan

Indeks Pengetahuan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk indeks Pendidikan adalah Angka Melek Huruf dan Angka Rata-rata lama Sekolah.

1. Angka melek huruf usia 15 tahun ke atas

Angka Melek Huruf Usia 15 Tahun ke atas (sampai dengan 59 tahun, sesuai dengan indikator dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional) Angka Melek Huruf usia 15 tahun keatas (sampai dengan 59 tahun, sesuai dengan indikator dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional) Angka Melek Huruf diatas usia 15 tahun, pada tahun 2020 angka melek huruf di Kota Madiun sudah mencapai 97,93 %

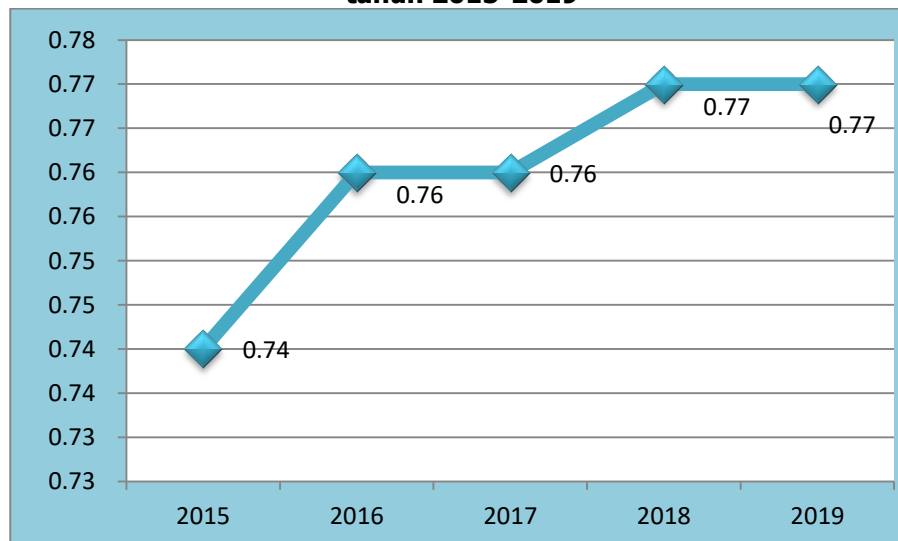
2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh semua jenis pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2019 adalah 11,13.

Sedangkan data sementara dari BPS Kota Madiun tahun 2020 untuk rata-rata lama sekolah yaitu 11,14. Dengan nilai rata-rata lama sekolah sebesar 11,14 maka artinya bahwa sebagian besar penduduk Kota Madiun telah menamatkan pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan dasar dan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Hal ini disebabkan makin sadar akan pentingnya pendidikan dan adanya suport dari Pemerintah Kota Madiun yaitu Program Pendidikan Dasar, Peningkatan sarana dan Prasarana Sekolah SD dan SMP dan Program BOS dari Pemerintah Pusat.

Indeks pengetahuan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2016 dan 2017 Indeks Pengetahuan Kota Madiun baru mencapai angka 0,76. Angka tersebut meningkat menjadi 0,77 pada tahun 2018 dan 2019. Untuk tahun 2019 Indeks Pengetahuan di Kota Madiun lebih tinggi daripada Indeks Pengetahuan Provinsi Jawa Timur. Trend kenaikan Indeks Pengetahuan sebagaimana tersaji pada grafik sebagai berikut :

Gambar III.9 Perkembangan Indeks Pengetahuan Kota Madiun tahun 2015-2019



Sumber Data : Badan Pusat Statistik

**)Angka Sementara*

Upaya dalam rangka meningkatkan indeks Pengetahuan di Kota Madiun dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1. Program manajemen pelayanan pendidikan
2. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
3. Program pendidikan dasar
4. Program pendidikan anak usia dini
5. Program pendidikan non formal

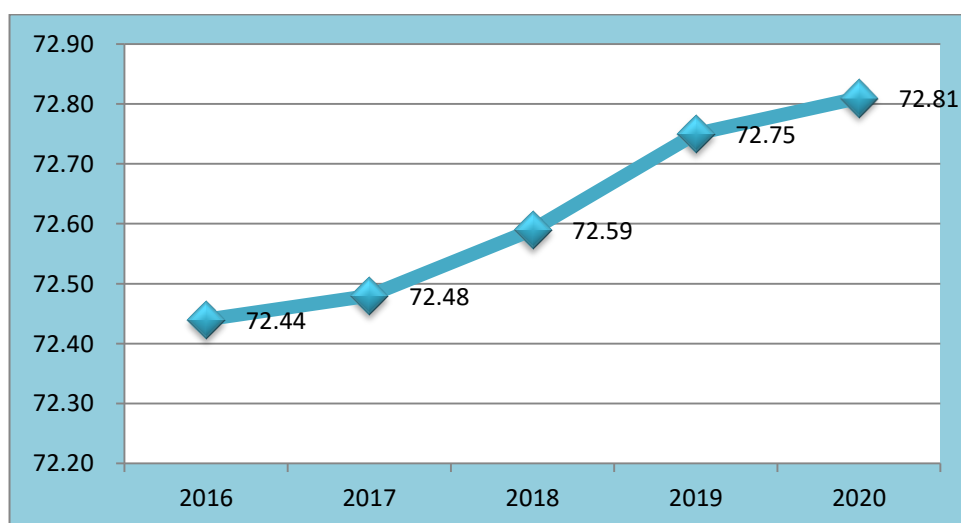
2. Indeks Kesehatan

Indikator meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat diukur dengan indikator kinerja Indeks Kesehatan yang dipengaruhi oleh yaitu Angka Harapan Hidup (AHH). Angka/Umur Harapan Hidup (AHH/UHH) secara definisi adalah perkiraan rata-rata lamanya hidup yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk dari sejak lahir. AHH dapat dijadikan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah pada keberhasilan pembangunan kesehatan serta sosial ekonomi di suatu wilayah, termasuk di dalamnya derajat kesehatan. Data AHH diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

AHH Kota Madiun 2020 yaitu sebesar 72,81 Tahun mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2019 yaitu 72,75. Angka harapan hidup warga Kota Madiun selalu mengalami peningkatan dalam setiap tahun, dan hal tersebut akan selalu di dukung oleh perangkat daerah terkait dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Adapun trend Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Madiun pada Tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar III.10 Trend Angka Harapan Hidup Kota Madiun tahun 2016-2020



Sumber Data : Badan Pusat Statistik



Dari grafik tersebut dapat dilihat adanya tren kenaikan dari AHH di Kota Madiun, dari Tahun 2016 ke Tahun 2020 mengalami kenaikan, hal tersebut disebabkan karena dukungan faktor kesehatan berupa:

- a. Pemantauan status kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif dan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sudah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.
- b. Adanya skrining faktor resiko penyakit tidak menular (PTM) pada kelompok usia produktif dan lansia, dimana adanya transisi epidemiologi dimana penyakit tidak menular trennya meningkat daripada penyakit menular sehingga dengan diadakannya skrining faktor resiko PTM akan berdampak ditemukan sedini mungkin.
- c. Peningkatan penemuan kasus pada penyakit menular untuk pengendalian penularan dan penurunan mortalitas akibat penyakit

Pencapaian kinerja indikator meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dilakukan dengan :

- 1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu
- 2) Penanggulangan Masalah Gizi pada Ibu Hamil
- 3) Penanggulangan Masalah Gizi pada Balita
- 4) Upaya Kesehatan Reproduksi
- 5) Upaya Kesehatan Lansia
- 6) Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
- 7) Pengembangan Kota Sehat

Tujuan 3 Misi 3 dan Sasaran 2 terdapat 2 indikator keberhasilan yaitu :

3. Misi Keempat : *Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Kesejahteraan Masyarakat kota*

Tujuan Pertama : *Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat*

Tabel III.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
				2019(n-1)	2020 (n)
4.1.1	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja	ICOR	2,30	2,61	-0,91
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,38	4,01	8,32
4.1.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan sektor perdagangan	5,91	6,20	-11,18*
		Pertumbuhan sektor pengolahan	7,30	6,82	-12,84*
		Pertumbuhan sektor Pariwisata	8,70	10,77	-7,98*
4.1.3	Stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Rasio ketersediaan pangan utama dan konsumsi pangan	1,03	1,03	1,38
		Indeks Gini	0,35	0,339	0,346
4.2.1	Meningkatnya kerukunan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan pemuda yang berprestasi	Indeks Kerukunan	2,77	-	3,70
		Prestasi Pemuda dan Olahraga ditingkat regional dan nasional	33	-	79
4.2.2	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Indeks Rasa Aman	85	-	76,05

Sumber Data : DPMPTSP, Satpol PP, Bakesbangpol, Badan Pusat Statistik

*)Angka Sementara

**Tabel III.21 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Akhir
Tahun RPJMD**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja
4.1.1	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja	ICOR	2,30	2,55	110,87%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,38	8,32	-46,15%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja
4..1.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan sektor perdagangan	5,91	-11,18*	-189,2%
		Pertumbuhan sektor pengolahan	7,30	-12,84*	-175,89%
		Pertumbuhan sektor Pariwisata	8,70	-7,98*	-91,72%
4.1.3	Stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Rasio ketersediaan pangan utama dan konsumsi pangan	1,03	1,38	134%
		Indeks Gini	0,35	0,346	101,14%
4.2.1	Meningkatnya kerukunan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan pemuda yang berprestasi	Indeks Kerukunan	2,77	3,7015	133,63%
		Prestasi Pemuda dan Olahraga ditingkat regional dan nasional	33	79	239%
4.2.2	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Indeks Rasa Aman	85	76,05	89,47%

Sumber Data : DPMPTSP, Satpol PP, Bakesbangpol, Badan Pusat Statistik

*)Angka Sementara

Tabel III.22. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Provinsi 2020	Realisasi Nasional 2020
4.1.1	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja	ICOR	2,55	-	-
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,32	3,92*	5,28
4.1.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan sektor perdagangan	-11,18*	-	-
		Pertumbuhan sektor pengolahan	-12,84*	-	-
		Pertumbuhan sektor Pariwisata	-7,98*	-	-
4.1.3	Stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Rasio ketersediaan pangan utama dan konsumsi pangan	1,38	-	-
		Indeks Gini	0,346	-	-
4.2.1	Meningkatnya kerukunan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan pemuda yang berprestasi	Indeks Kerukunan	3,7015	-	-
		Prestasi Pemuda dan Olahraga ditingkat regional dan nasional	79	-	-
4.2.2	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Indeks Rasa Aman	76,05	-	-

Sumber Data : DPMPTSP, Satpol PP, Bakesbangpol, Badan Pusat Statistik

*)Angka Sementara



Tujuan 1 Misi 4 dan Sasaran 1 terdapat 2 indikator keberhasilan yaitu :

1. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output), dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap *output*.

Dalam perencanaan pembangunan wilayah, pada umumnya pemerintah telah menentukan target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Salah satu faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah tingkat investasi yang ditanamkan suatu sektor tersebut. Investasi akan meningkatkan kapasitas produksi dan pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Analisis ICOR bertujuan untuk menyediakan informasi dalam rangka mengevaluasi tingkat efisiensi penggunaan barang modal dalam proses produksi pada masing-masing sektor ekonomi. Berdasarkan angka ICOR menurut lapangan usaha, maka dapat diestimasi kebutuhan investasi untuk mencapai target pertumbuhan tertentu.

Capaian ICOR untuk tahun 2020 Kota Madiun 2019 adalah sebesar 2,55, sedangkan untuk data dari BPS 2020 belum rilis. Capaian ini akan mempengaruhi nilai realisasi investasi DPMPTSP. Nilai realisasi investasi di Kota Madiun tahun 2020 adalah sebesar Rp. 327.632.796.023 hal melebihi target yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 183.000.000.000 dengan capaian kinerja 178%. Ini menunjukkan bahwa Kota Madiun walaupun kota kecil, namun peningkatan investasinya sangat tinggi. Nilai investasi yang paling besar yaitu ada di bidang usaha perdagangan. Bahkan nilainya hampir 60% dari total realisasi. Bidang usaha perdagangan ini meliputi fashion, kuliner, dan komoditas lainnya.

Di masa pandemi Covid-19 ini justru jumlah pelaku usaha UMKM meningkat. Sehingga nilai investasi bisa terdongkrak. Selain bidang usaha perdagangan, kata dia, ada dua sektor lain yang juga mendominasi nilai investasi di Kota Madiun yaitu restoran dan usaha hotel. Berikut adalah kenaikan maupun penurunan nilai investasi di Kota Madiun tahun 2016-2020.

Tabel III.22. Tabel Nilai Realisasi Investasi di Kota Madiun terhadap Target Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA Non Fasilitas.	2016	287 M	347 M	120 %
		2017	310 M	1.388 M	447 %
		2018	334 M	966 M	289 %
		2019	361 M	968 M	268%
		2020	183 M	327 M	178%

Sumber Data : DPMPTSP

Nilai investasi sangat bergantung pada pihak ketiga (investor) dan dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga cenderung sulit diprediksi dan nilainya sangat fluktuatif.

Kenaikan/penurunan nilai realisasi investasi PMDN di Kota Madiun dipengaruhi oleh :

1. Terbatasnya lahan di Kota Madiun, sehingga tidak memungkinkan untuk sektor industri yang besar untuk berinvestasi
2. Sektor yang dominan di wilayah Kota Madiun adalah sektor perdagangan dan jasa
3. Stabilitas politik dan keamanan
4. Suku bunga



5. Skill tenaga kerja
6. Nilai tukar rupiah
7. Kualitas sumber daya manusia
8. Perubahan regulasi dibidang perizinan

Adapun upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan nilai investasi di Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Melakukan promosi investasi
2. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan investasi
3. Melakukan kerjasama investasi
4. Penyusunan rencana umum penanaman modal (RUPM)
5. Peningkatan pelayanan perijinan dengan membangun sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah melalui MASS (Madiun Kota Single Submission)
6. Menyediakan berbagai kemudahan bagi investor yang akan menanamkan saham di Kota Madiun. Seperti lokasi, strategi, tenaga kerja, hingga perizinan yang mudah.

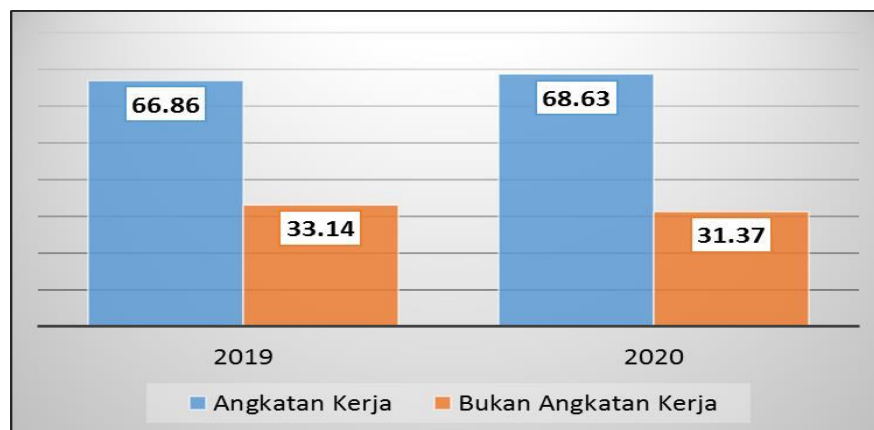
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran Terbuka atau sering juga disebut pengangguran penuh adalah jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu mereka yang bekerja dan penganggur. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru.

Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kota Madiun juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran.

Penduduk usia kerja di Kota Madiun tahun 2019 tercatat mencapai 142.849 jiwa yang mengalami kenaikan sebesar 2.723 jiwa apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya sebesar 142.089 jiwa, demikian juga di tahun 2020 usia kerja naik menjadi 143.561 jiwa. Apabila dilihat dari pola usia kerja dalam rentang tiga tahun terakhir ini, usia kerja di Kota Madiun menunjukkan pola yang hampir sama dimana jumlah angkatan kerja lebih banyak dibanding jumlah bukan angkatan kerja.

Gambar III.5 Persentase Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Kota Madiun Tahun 2019-2020



Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Dilihat dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa ada pergeseran dari tahun 2019 ke tahun 2020, dimana jumlah angkatan kerja di Kota Madiun mengalami kenaikan sebesar 1,77 persen poin dan bukan angkatan kerja mengalami penurunan dari 33,14 persen menjadi 31,37 persen atau turun sebesar 1,77 persen poin.

Lebih detilnya, penduduk usia kerja di Kota Madiun tahun 2019 sebagian besar adalah penduduk yang bekerja dengan jumlah mencapai 91.723 jiwa, pengangguran sebanyak 3.483 jiwa, dan bukan angkatan kerja sebanyak 47.338 jiwa. Sedangkan untuk kondisi tahun 2020 penduduk bekerjasebanyak 90.334 jiwa, pengangguran 8.195 jiwa, dan bukan angkatan kerja sebanyak 45.032 jiwa.

Berikut tabel Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Kota Madiun Tahun 2019-2020 :

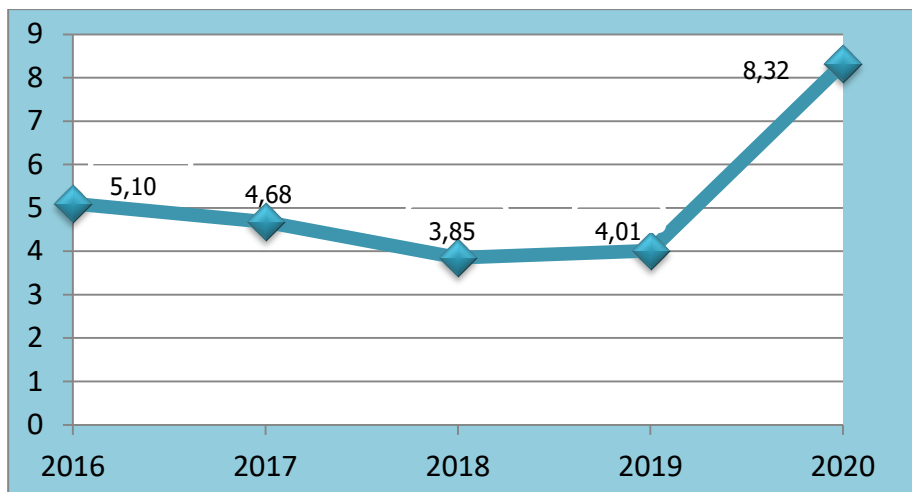
**Tabel III.15 Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Kota Madiun
Tahun 2019-2020**

KEGIATAN	2019	2020
ANGKATAN KERJA	95.511	98.529
- BEKERJA	91.730	90.334
- PENGANGGURAN	3.781	8.195
BUKAN ANKATAN KERJA	47.338	45.032
JUMLAH	142.849	143.561

Berdasarkan tabel di atas, dari tahun 2019 ke 2020 terdapat kenaikan jumlah angkatan kerja yang disertai dengan jumlah penduduk bekerja yang menurun, namun jumlah pengangguran meningkat. Pada tahun 2020 jumlah penduduk bekerja turun sebanyak 1.396 jiwa atau turun sebesar 1,52 persen. Sedangkan pengangguran naik dari 3.781 menjadi 8.195 jiwa, dengan jumlah kenaikan sebanyak 4.414 jiwa atau 116,7 persen. Penurunan terjadi pada kelompok bukan angkatan kerja dari 47.338 menjadi 45.032 jiwa, dengan jumlah penurunan sebanyak 2.306 jiwa atau 4,8 persen. Jadi, Jumlah Penduduk Usia Kerja secara umum mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebanyak 142.849 jiwa menjadi 143.561 jiwa di tahun 2020, dengan persentase kenaikan sebesar 0,0%.

Adapun perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Gambar III.11. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun tahun 2016-2020



Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2020 adalah sebesar 8,32 %, yaitu perbandingan antara pengangguran sebesar 8.195 orang dengan angkatan kerja sebesar 98.529 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 4,31 % dari TPT tahun 2019 yaitu sebesar 4,01 % atau 3.776 orang, dengan kenaikan jumlah pengangguran sebanyak 4.419 orang. Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2020 ini diakibatkan oleh Pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai sektor, diantaranya sektor ketenagakerjaan seperti banyak pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan jumlah pengangguran semakin tinggi, tidak ada rekrutmen calon tenaga kerja baru oleh pemberi kerja. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun lebih) sebesar 1,77% dari tahun sebelumnya atau naik sebanyak 2.539 orang. Peningkatan jumlah usia kerja di Kota Madiun ini dibarengi dengan peningkatan angkatan kerja sebanyak 4.424 orang. Apabila di bandingkan dengan target TPT tahun 2020 sebesar 3,45 %, realisasi TPT tahun 2020 sebesar 8,32 %. Untuk TPT apabila Capaian Kinerja lebih kecil dari target maka Capaian kinerja semakin baik, karena angka pengangguran lebih kecil dari target.



Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka menurun tetapi didominasi oleh sektor jasa sedangkan pada sektor ini tidak terlalu besar penyerapan tenaga kerjanya. Memperhatikan jumlah kondisi tersebut maka upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pencari kerja dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
- b. Menyelenggarakan kegiatan job fair/bursa kerja untuk mempermudah pemberi kerja mendapatkan calon tenaga kerja, dan pencari kerja bisa dipertemukan langsung dengan pemberi kerja.
- c. Melakukan pembinaan dan monitoring Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekolah, Lembaga Swasta dan atau Perguruan Tinggi guna terciptanya koordinasi dan kerjasama yang baik untuk dapat menempatkan alumni atau calon pencari kerja baru dengan pemberi kerja sesuai kompetensi masing-masing.
- d. Optimalisasi Informasi antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja (IPK)
- e. Melakukan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
- f. Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan
- g. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
- h. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
- i. Menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk membuka peluang pekerjaan
- j. Updating data pengangguran tenaga kerja sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran di Kota Madiun

Selanjutnya untuk Sasaran Strategis "Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor-Sektor Unggulan Daerah" terdiri dari 3 indikator yang berkaitan dengan sektor perdagangan, industri dan pariwisata.



Sektor perdagangan, industri dan pariwisata (akomodasi dan makan minum) merupakan sektor yang dominan kontribusinya terhadap PDRB Kota Madiun dalam beberapa tahun terakhir. Sektor-sektor tersebut memang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan karena Kota Madiun merupakan pusat perdagangan serta perbelanjaan di wilayah Jawa Timur Bagian Barat. Selain itu dengan semakin berkembangnya usaha ritel seperti supermarket dan swalayan secara tidak langsung akan mampu meningkatkan peranan sektor ini.

Indikator kinerja pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, industri dan pariwisata digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor-sektor unggulan daerah. Persentase pertumbuhan dihitung menggunakan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), yaitu dengan membandingkan selisih antara angka PDRB tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya pada masing-masing sektor tersebut, dibagi dengan angka PDRB sektor tersebut pada tahun sebelumnya dikalikan 100%.

Indikator keberhasilan untuk Misi 4 Tujuan 1 Sasaran 2 terdiri dari 3 Indikator yaitu :

1. Pertumbuhan Sektor Perdagangan

Besaran pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2020 berdasarkan data dari BPS dengan angka sementara adalah sebesar -11,18. Fasilitas perdagangan yang berperan menggerakkan perekonomian di Kota Madiun diantaranya adalah tersedianya pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Aktivitas perdagangan di pasar-pasar tersebutlah yang sangat berperan dalam meningkatkan kontribusi sektor perdagangan. Jumlah pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Madiun adalah sejumlah 17 unit pasar yang tersebar dalam 3 Kecamatan di Kota Madiun, dengan salah satu diantaranya adanya Pasar Besar Madiun yang menampung pedagang dari wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.



Namun demikian periode April sampai dengan Juni merupakan waktu yang berat bagi kinerja ekonomi di wilayah manapun seiring dengan masih merebaknya wabah Covid19 termasuk Kota Madiun. Menurunnya daya beli masyarakat akibat penurunan sebagian besar kegiatan usaha dan penerapan PSBB dan terbatasnya aktivitas produksi serta konstruksi menyebabkan capaian kinerjanya mengalami penurunan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka memperbaiki Pertumbuhan Sektor Perdagangan antara lain :

- 1) Melakukan Promosi Produk Perdagangan
- 2) Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan
- 3) Melakukan Pengawasan Terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
- 4) Meningkatkan Mutu Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)
- 5) Melakukan Pengawasan Perijinan Perdagangan
- 6) Melakukan Pembinaan dan Pengawasan PKL
- 7) Membangun Jejaring Perdagangan Lintas Kota
- 8) Melakukan Pendataan Volume Perdagangan Kota Madiun
- 9) Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat
- 10) Meningkatkan Kebersihan dan Keamanan Pasar Rakyat
- 11) Melakukan Promosi Pasar Rakyat

2. Pertumbuhan Sektor Industri

Sektor industri merupakan kontributor terbesar kedua terhadap PDRB Kota Madiun. Untuk capaian kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Industri pada tahun 2020 dengan target 5,91 terealisasi sebesar -12,84. Dibandingkan periode sebelumnya, posisi distribusi PDRB terjadi pergeseran dari kategori lapangan usaha Industri Pengolahan di posisi kedua mulai tergeser oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yang sebelumnya pada posisi ketiga.



Pergeseran tersebut sangatlah wajar mengingat kebutuhan komunikasi utamanya internet pada masa pandemi dengan berbagai regulasi yang ada, untuk sarana komunikasi serta informasi meningkat tajam. Sementara itu lapangan usaha industri pengolahan mengalami tekanan akselerasi yang cukup tinggi di seluruh subkategori kecuali industri pengolahan tembakau terakselerasi akibat kenaikan tarif cukai hasil tembakau, serta meningkatnya produksi pada industri kimia dan farmasi. Hal ini menyebabkan capaian kinerja pertumbuhan sektor industri juga mengalami penurunan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka membangkitkan kembali pertumbuhan sektor Industri adalah :

1. Peningkatan mutu dan kualitas produk unggulan daerah
2. Peningkatan daya saing mutu, desain dan kemasan produk IKM dalam menghadapi dampak globalisasi
3. Peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan dari perkembangan usaha
4. Penambahan inovasi dan diversifikasi produk
5. Memperkuat jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan para pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM
6. Peningkatan produk berorientasi ekspor
7. Peningkatan dan pemberdayaan IKM melalui pola klaster

3. Pertumbuhan Sektor Pariwisata

Untuk pertumbuhan sektor pariwisata di Kota Madiun pada tahun 2020 adalah sebesar -7,98. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat mengakibatkan sepi pengunjung hotel dan restoran. Selain itu, kebijakan belajar di rumah juga berdampak pada sepi usaha penyediaan kamar kos bagi mahasiswa/pelajar sehingga sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja di indikator ini.



Kota Madiun tidak mempunyai destinasi wisata yang bersifat alam, maka telah dilakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dengan mengembangkan wisata buatan maupun wisata budaya. Sektor pariwisata merupakan sektor yang masih potensial untuk dikembangkan, terutama dari subsektor penyediaan akomodasi. Dengan semakin banyaknya hotel yang berdiri di Kota Madiun, seharusnya juga diimbangi dengan pengembangan berbagai fasilitas pendukung untuk menarik wisatawan datang dan berkunjung ke Kota Madiun. Misalnya melalui pengembangan budaya khas Kota Madiun, pengembangan makanan khas, serta memperbanyak even-even yang diselenggarakan di Kota Madiun. Di samping itu dengan pembangunan kawasan wisata modern di sudut-sudut Kota Madiun salah satunya Pahlawan Street Center yang menjadi ikon Kota Madiun. Dengan harapan upaya-upaya ini akan dapat memulihkan pertumbuhan sektor pariwisata di Kota Madiun setelah masa Pandemi Covid-19 berakhir.

Program-program yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dalam rangka meningkatkan destinasi pariwisata di Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Madiun sejuta bunga
2. Penataan Ngrowo Bening yang merupakan lahan aset PDAM menjadi Greenhouse Anggrek dan budidaya bonsai
3. Bus Wisata
4. Pembangunan Monumen Selamat datang Kota Madiun
5. Penataan Pedestrian Sepanjang Jalan Pahlawan (Pahlawan Street Center)
6. Pembangunan dan penataan pusat kuliner di Jalan Rimba Dharma
7. Penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima
8. Penggantian pohon yang sudah tua dan lapuk dengan pohon berbunga
9. Taman Nambangan jalan Mayjend Sungkono



10. Penataan Kawasan Sumber Umis

11. Melakukan pemeliharaan terhadap cagar budaya terutama Masjid dan Makam Kuncen serta Masjid dan Makam Taman agar lebih terawat dan menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya serta berusaha untuk melakukan penelitian keabsahan benda/bangunan yang diduga cagar budaya yang masih tersisa untuk ditetapkan sebagai benda/bangunan cagar budaya yang bisa dilestarikan.

Sasaran Strategis "Stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat" terdiri dari 2 indikator yaitu Rasio Ketersediaan Pangan Utama dan Konsumsi Pangan serta Indeks Gini.

1. Rasio Ketersediaan Pangan Utama dan Konsumsi Pangan

Ketersediaan pangan yang cukup untuk seluruh penduduk di suatu wilayah belum menjamin terhindarnya penduduk dari masalah pangan dan gizi. Kebutuhan pangan untuk konsumsi rumah tangga merupakan hal pokok dalam kelangsungan hidup.

Untuk itu, selain ketersediaannya juga perlu diperhatikan pola konsumsi rumah tangga atau keseimbangan kontribusi diantara jenis pangan yang dikonsumsi, sehingga dapat memenuhi standar gizi yang dianjurkan. Pola konsumsi pangan rumah tangga dipengaruhi oleh pola makan sebagian besar penduduk, ketersediaan bahan pangan, dan tingkat pendapatan. Ketersediaan dan konsumsi pangan dapat menjadi masalah utama yang disebabkan oleh adanya kekurangan pemenuhan kebutuhan konsumsi semestinya dimana pada akhirnya untuk memenuhi ketersediaan pangan Kota Madiun diperlukan adanya cadangan makanan.

Perhitungan ketersediaan pangan wilayah ini sangat penting dilakukan untuk melihat surplus tidaknya pangan di suatu daerah tertentu. Dengan diketahuinya ini neraca tersebut maka antisipasi untuk ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan dapat dilakukan sejak dini.

Rasio ketersediaan bahan pangan utama merupakan persentase dari perbandingan jumlah ketersediaan bahan pangan utama terhadap jumlah konsumsi bahan pangan utama. Ketersediaan bahan pangan merupakan bahan pangan yang berasal dari produksi domestik, impor/pasokan dari luar daerah dan stok yang telah dikurangi ekspor/penjualan ke luar daerah dalam setahun.

Rasio ketersediaan pangan utama

= Ketersediaan pangan utama (ton)/ Konsumsi pangan utama (ton)

= 21.677/15.645

= 1,38

Pangan utama yang dikonsumsi penduduk Kota Madiun adalah beras. Pada tahun 2020 jumlah ketersediaan beras dalam setahun adalah 21.677 ton sedangkan jumlah konsumsi pangan selama setahun adalah 15.645 ton. Dengan demikian capaian kinerja indikator rasio ketersediaan pangan utama Kota Madiun tahun 2020 adalah 1,38 sehingga melebihi dengan target yang telah ditetapkan sebesar 1,03.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja indikator

Rasio ketersediaan pangan utama antara lain :

- 1) Perencanaan pelaksanaan kegiatan yang lebih matang sehingga penyerapan anggaran lebih optimal
- 2) Penataan personil pada seksi/bidang sesuai dengan tupoksinya agar kegiatan berjalan dengan optimal
- 3) Mengembangkan pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan misal : penggunaan pupuk organik, agens hayati dan biopestisida
- 4) Usaha peternakan ramah lingkungan/ bebas polusi limbah

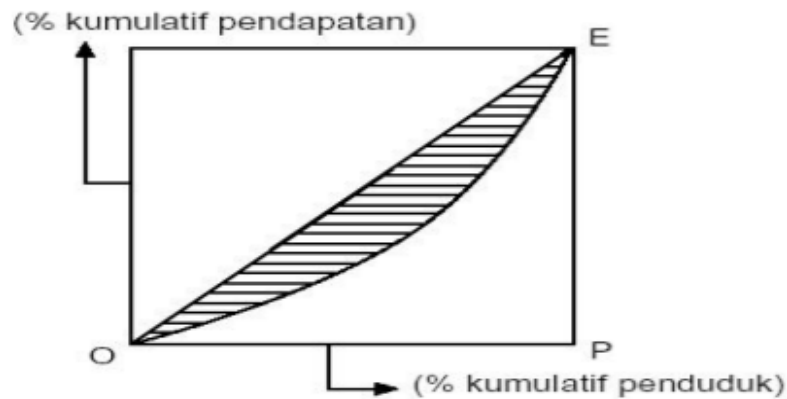


- 5) Perlindungan terhadap usaha pertanian dan peternakan melalui asuransi
- 6) Peningkatan penggunaan fasilitas kredit UMKM untuk petani/peternak/petani ikan
- 7) Perbaikan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan (JUT; RPH dan BBI agar meningkatkan produksi)
- 8) Peningkatan kualitas SDM pertanian, peternakan dan perikanan melalui penyuluhan, pelatihan, pendampingan, sosialisasi dan transfer teknologi
- 9) Pemberdayaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani agar dapat lebih memanfaatkan kelembagaan untuk penguatan nilai tawar petani dan pengembangan bisnis pertanian
- 10) Meningkatkan publikasi pelaksanaan kegiatan agar berjalan dengan baik
- 11) Penyediaan sarana prasarana pertanian (infrastruktur, sarana produksi pupuk dan obat tanaman)
- 12) Updating database bahan/ data untuk perencanaan dan pelaporan kegiatan secara periodik

2. Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).

Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.



Dari gambar di atas, sumbu horisontal menggambarkan prosentase kumulatif penduduk, sedangkan sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing prosentase penduduk tersebut. Sedangkan garis diagonal di tengah disebut "garis pemerataan sempurna". Karena setiap titik pada garis diagonal merupakan tempat kedudukan prosentase penduduk yang sama dengan prosentase penerimaan pendapatan. Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat ketidaktermerataannya. Sebaliknya semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataan distribusinya. Pada gambar tersebut, besarnya ketimpangan digambarkan sebagai daerah yang diarsir. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan "rendah"; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan "moderat"; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan "tinggi". Indeks Gini Kota Madiun Tahun 2020 adalah sebesar 0,346. Berdasarkan data, kondisi ketimpangan di Kota Madiun masuk dalam kategori ketimpangan moderat.



Berikut upaya-upaya yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian kinerja indikator Indeks Gini yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan dasar publik yang meliputi air bersih, sanitasi, gizi, pengetahuan ibu dan pelayanan kesehatan
- 2) Melakukan stabilisasi harga pangan dengan melakukan operasi pasar terhadap harga bahan pokok pangan
- 3) Melakukan bantuan sosial yang tepat sasaran
- 4) Melakukan pendataan PMKS secara berkala
- 5) Melakukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan keahlian teknis dan sertifikasi
- 6) Melakukan kemitraan di bidang industri dan investasi yang menyerap tenaga kerja besar
- 7) Memperkuat UMKM
- 8) Menguatkan industri berbasis rakyat

Tujuan Kedua : *Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif*

Sasaran 1 : *Meningkatnya Kerukunan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang berprestasi*

Pada sasaran ini terdapat 2 indikator yaitu Indeks Kerukunan dan Prestasi Pemuda dan Olah Raga di Tingkat Regional dan Nasional

1. Indeks Kerukunan

Kerukunan umat beragama mempunyai kedudukan strategis bagi kelangsungan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia. Oleh karena itu harus dikelola dengan baik dan tepat. Agama apapun yang dianut masyarakat akan berlaku pada kehidupan berbangsa dan bernegara bila memang implementasi dari ajaran agama tersebut dijiwai dan diamalkan dengan benar.



Adapun capaian kinerja untuk indikator ini tahun 2020 adalah sebesar dengan status/predikat Harmonis, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu 3,7000 maka terdapat peningkatan sebesar 0,0015.

Terdapat 5 (lima) dimensi yang diukur secara berurutan :

- 1) Jujur
- 2) Menerima
- 3) Menghormati
- 4) Kesetaraan
- 5) Teladan

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meminimalisir terjadinya konflik di Kota Madiun yaitu :

1. Kegiatan Rakor Forkopimda mengadakan pertemuan dengan masyarakat membahas isu yang berkembang di masyarakat untuk mencari solusi pemecahan masalah.
2. Sosialisasi, sarasehan dan pembinaan kepada berbagai elemen masyarakat, pelajar dan generasi muda tentang kehidupan berbangsa dan bernegara,
3. Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan kondusif di Kota Madiun.
4. Membentuk Tim Kewaspadaan Dini untuk menampung informasi terkait isu permasalahan yang akan menimbulkan konflik di masyarakat.
5. Penyusunan Peta Rawan Konflik yaitu suatu kajian tentang wilayah rawan konflik di Kota Madiun. Hasil yang diharapkan dari Pemetaan rawan konflik adalah untuk mengantisipasi tidak terjadinya potensi konflik sosial terutama memberikan gambaran dan pemetaan rawan konflik sosial di Kota Madiun, sehingga potensi konflik bisa terdeteksi dan tidak terjadi di Kota Madiun.



6. Memfasilitasi/audiensi terjadinya konflik yang timbul di masyarakat yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan.
-
2. Prestasi Pemuda dan Olah Raga di Tingkat Regional maupun Nasional
Capaian kinerja untuk indikator Prestasi Pemuda dan Olah Raga di tingkat Regional maupun Nasional adalah 79 orang melampaui target yang telah ditetapkan di tahun 2020 yaitu sebesar 33 orang. Dalam rangka meningkatkan potensi dan prestasi pemuda di bidang olahraga, Pemerintah Kota Madiun telah melakukan inovasi dan ide-ide kreatif pembinaan kepada para pemuda melalui media-media elektronik maupun media digital.
Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan prestasi pemuda dan olah raga di tingkat regional maupun nasional antara lain :
 - 1) Pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan
 - 2) Pembinaan dan pengembangan olah raga, pendidikan, prestasi dan rekreasi
 - 3) Peningkatan sarana dan prasarana olah raga
 - 4) Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan
 - 5) Meningkatkan keikutsertaan generasi muda di berbagai ajang perlombaan

Sasaran 2 : *Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan*

Pada sasaran ini terdapat 1 indikator yaitu Indeks Rasa Aman

1. Indeks Rasa Aman

Capaian kinerja untuk indikator Indeks Rasa Aman tahun 2020 adalah sebesar 76,05 dengan peringkat **aman**, sehingga melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 76. Sehingga Capaian Kinerja hanya mencapai persentase sebesar 100,06%. Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan.



Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa, harta, dan kehormatan. Indeks keamanan sebagai salah satu alat pengukuran tingkat keamanan dan digunakan untuk mengukur perubahan tingkat keamanan. Terdapat empat dimensi dalam yang digunakan dalam pengukuran indeks rasa aman yaitu :

- 1) Dimensi Keamanan dari Bencana (Kebencanaan)
- 2) Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial (Kesejahteraan Sosial)
- 3) Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinnekaan (Kebhinnekaan)
- 4) Dimensi Keamanan dari Kekerasan (Kekerasan)

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Madiun tahun 2020, total anggaran belanja tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.215.509.166.082,81. Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 554.126.889.031,40 dan belanja langsung sebesar Rp. 661.382.277.051,41. Belanja tidak langsung terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Sedangkan belanja langsung terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja langsung digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, sebagai penjabaran strategi dan kebijakan sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja langsung dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis.

Realisasi belanja APBD Kota Madiun tahun 2020 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut :

Tabel III.23 Realisasi APBD Kota Madiun tahun 2020

Kelompok Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	554.126.889.031,40	401.753.955.582,53	72,40
Belanja Langsung	660.097.390.709,41	611.417.563.527,67	92,62
Total APBD	1.214.224.279.739,81	1.014.631.224.152	83,56

Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun

Anggaran Belanja Langsung sebagaimana tabel tersebut terdiri dari program-program rutin operasional kantor yang melekat pada seluruh perangkat daerah serta program-program strategis masing-masing perangkat daerah sesuai dengan bidang urusan yang menjadi kewenangannya. Adapun besaran anggaran dan realisasi belanja langsung untuk program rutin dan operasional seluruh perangkat daerah adalah sebagaimana berikut :

Tabel III.24 Realisasi Belanja Langsung untuk Program rutin dan operasional seluruh Perangkat Daerah

No	Program rutin operasional	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Program pendukung (4 program)	102.091.648.512,00	77.611.089.877,69	76,02

Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun



Tabel III.25 Penyerapan anggaran per sasaran sesuai APBD tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	26.105.260.254	19.770.439.990	75,73
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2.307.439.650	1.919.242.811	83,17
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	11.790.446.460	10.943.942.777	92,82
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	563.832.720	534.955.164	94,87
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Opini BPK	10.214.816.100	7.516.493.583	73.58
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Persentase Kelurahan yang Mendapatkan Klasifikasi Swasembada	34.319.173.746	31.579.508.619,22	92.01
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	2.398.466.160	2.267.373.362	94.53



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Sarana Transportasi Kota dan Permukiman	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	2.116.404.000	1.604.500.822,26	75.81
		Indeks Infrastruktur	98.702.383.852,20	84.911.551.572	86.02
		Kinerja Ruas Jalan	6.199.722.960	4.928.241.268	79.49
5	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	8.148.612.560	7.076.880.584	86.84
		Persentase Ruang yang dimanfaatkan RTRW	18.473.092.260	17.125.825.461,68	92.70
6	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Kota Madiun	Indeks Kesehatan	161.922.643.642	133.413.912.337	82.39
7	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun	Indeks Pengetahuan	117.500.898.473,21	91.303.367.657,21	77.70
8	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja	ICOR	1.118.283.528	873.875.941	78.14
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	42.513.854.270	36.281.758.682	85.34



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
9	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan sektor perdagangan	8.178.567.900	6.860.944.557	83.88
		Pertumbuhan sector pengolahan	510.167.382	482.502.658	94.57
		Pertumbuhan sector Pariwisata	916.103.060	813.566.838	88.80
10	Stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Rasio ketersediaan pangan utama dan konsumsi pangan	4.214.357.725	4.087.769.002	96.99
		Indeks Gini	12.627.824.474	11.949.313.639	94.62
11	Meningkatnya kerukunan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan pemuda yang berprestasi	Indeks Kerukunan	4.196.282.105	2.156.579.045	51.39
		Prestasi Pemuda dan Olahraga ditingkat regional dan nasional	3.742.272.480	3.410.450.712	91.13
12	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Indeks Rasa Aman	5,643,768,686.00	4,903,084,185.00	86.87



Tabel III.26 Efisiensi anggaran belanja per sasaran tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	109,19	75,73	33,46
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	103	83,17	19,83
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	89,24	92,82	-
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	97,41	94,87	-
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Opini BPK	100	73,58	26,42
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Persentase Kelurahan yang Mendapatkan Klasifikasi Swasembada	124,92	92,01	32,91
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	92,58	94,53	-



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Sarana Transportasi Kota dan Permukiman	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	100,58	75,81	24,77
		Indeks Infrastruktur	100,16	86,02	14,14
		Kinerja Ruas Jalan	113,64	79,49	34,15
5	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100,58	86,84	13,76
		Persentase Ruang yang dimanfaatkan RTRW	100	92,70	7,30
6	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Kota Madiun	Indeks Kesehatan	100	82,39	17,61
7	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun	Indeks Pengetahuan	100	77,70	22,30
8	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja	ICOR	235,86	78,14	157,72
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	-18,95	85,34	-



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
9	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan sektor perdagangan	-189,17	83,88	-
		Pertumbuhan sector pengolahan	-175,89	94,57	-
		Pertumbuhan sector Pariwisata	-91,72	88,80	-
10	Stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Rasio ketersediaan pangan utama dan konsumsi pangan	134	96,99	37,01
		Indeks Gini	101,43	94,62	6,81
11	Meningkatnya kerukunan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan pemuda yang berprestasi	Indeks Kerukunan	133,57	51,39	82,18
		Prestasi Pemuda dan Olahraga ditingkat regional dan nasional	239	91,13	8,87
12	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Indeks Rasa Aman	100,07	86,87	13,20

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja tahun 2020 pada masing-masing sasaran sudah berhasil dicapai, terlihat dengan nilai rata-rata capaian kinerja yang sudah mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya sudah efektif dalam mencapai target yang ditetapkan.



Tingkat efisiensi pada masing-masing sasaran dapat disampaikan sebagai berikut :

1) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah

Terdapat 2 (dua) indikator yang sudah efisien yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dengan tingkat efisiensi sebesar 33,46 dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan tingkat efisiensi sebesar 19,83. Sedangkan 2 (dua) indikator belum efisien yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

2) Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sasaran ini memiliki satu indikator yaitu Opini BPK dengan tingkat efisiensi sebesar 26,42.

3) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Dari 2 (dua) indikator pada sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator yaitu Persentase Kelurahan yang Mendapatkan Klasifikasi Swasembada dengan tingkat efisiensi sebesar 32,91 dan 1 (satu) indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang belum efisien.

4) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Sarana Transportasi Kota dan Permukiman

Ketiga indikator pada sasaran ini semuanya efektif dengan masing-masing tingkat efisiensi Indeks Sarana Prasarana Permukiman sebesar 24,77, Indeks Infrastruktur sebesar 14,14 dan Kinerja Ruas Jalan sebesar 34,15.

5) Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indikator Persentase Ruang yang dimanfaatkan RTRW sudah efisien dengan tingkat efisiensi masing-masing sebesar 13,76 dan 7,30

6) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Kota Madiun dengan indikator Indeks kesehatan sudah menunjukkan efisiensi dengan dengan tingkat efisiensi sebesar 17,61



- 7) Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun dengan indikator Indeks Pengetahuan sudah menunjukkan efisiensi dengan tingkat efisiensi sebesar 22,30
- 8) Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja
Sasaran kedelapan mempunyai 2 (dua) indikator yaitu ICOR dengan tingkat efisiensi sebesar 157,72, sedangkan untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) belum efisien.
- 9) Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah
Ketiga indikator pada sasaran ini yaitu Pertumbuhan sektor perdagangan, Pertumbuhan sektor pengolahan dan Pertumbuhan sektor Pariwisata dan secara belum efektif, karena terdampak oleh kondisi pandemi Covid-19
- 10) Stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
Kedua indikator yaitu Rasio ketersediaan pangan utama dan konsumsi pangan serta Indeks Gini pada sasaran ini sudah efisien dengan tingkat efisiensi masing-masing sebesar 37,01 dan 6,81
- 11) Meningkatnya kerukunan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan pemuda yang berprestasi
Pada sasaran ini tingkat efisiensi untuk indikator Indeks Kerukunan adalah sebesar 82,18 dan indikator Prestasi Pemuda dan Olahraga ditingkat regional dan nasional sebesar 8,87
- 12) Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Tingkat efisiensi untuk Indeks Rasa Aman adalah sebesar 13,20.

Dari 24 (dua puluh empat) indikator makro sasaran strategis Pemerintah Kota Madiun terdapat indikator-indikator yang belum memenuhi target yaitu dengan capaian kinerja di bawah 100%, yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Indeks Pemberdayaan Gender, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Pertumbuhan Sektor Pengolahan dan Pertumbuhan Sektor Pariwisata.



Hal ini disebabkan bahwa penghitungan capaian belum bersifat final (masih tahap penghitungan). Selain itu juga karena dampak merebaknya pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum berakhir, Sehingga indikator yang capaian kerjanya memenuhi maupun melampaui target yang ditetapkan adalah sebesar 70,83% dengan realisasi anggaran sebesar 83,56%.

Adapun perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran pada tabel di atas, tidak bisa serta merta ditetapkan tingkat efisiensinya, dikarenakan pada masing-masing indikator bisa jadi dibiayai oleh anggaran pada Perangkat lain yang justru tidak bersentuhan secara langsung. Karena pada dasarnya ada beberapa alokasi anggaran yang bersifat multiplier effect bagi indikator lainnya. Misalnya capaian kinerja yang cukup tinggi pada sektor pariwisata, tentunya merupakan efek samping dari pembangunan sarana prasarana jalan dan jembatan di Kota Madiun dan publikasi potensi Kota Madiun yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Masing-masing Perangkat Daerah saling bersinergi baik dari sisi anggaran maupun pencapaian kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota dengan tema dan prioritas pembangunan di Tahun 2020 yaitu Penguatan Kapasitas *Pemberdayaan Masyarakat Percepatan untuk Pertumbuhan yang Berkualitas*.

Selain pencapaian kinerja dimaksud Pemerintah Kota Madiun telah mendapatkan penghargaan antara lain sebagai berikut :

1. Penghargaan Top 20 Bupati/Walikota sebagai Pembina K3 tahun 2020 Tingkat Provinsi Jawa Timur
2. Penghargaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) level 3
3. Penyerahan hasil evaluasi SAKIP 2019
4. 5 Besar Kategori Media Word Summit Information Society (WSIS) Prizes 2020 untuk program Literasi TIK Kota Madiun
5. Juara II Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK (Kelurahan Patihan)



6. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur
7. Penghargaan kepada Walikota Madiun Maldi atas kontribusi dan peran aktif dalam Pelaksanaan Sensus Penduduk Online tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur
8. Juara 1 Duta Generasi Berencana Jawa Timur atas nama Dhefara Hersaning Djati
9. Penghargaan Lencana Melati kepada Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab) Kota Madiun Maldi dari Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso
10. Penghargaan Positif News Maker kepada Walikota Madiun Maldi dari Times Indonesia
11. Juara II Duta Anti Narkoba gerakan Peduli Anti Narkoba (GPAN) Jatim 2020 atas nama Evy Merdika
12. Penghargaan kepada Walikota Madiun Maldi dari Kementerian Perhubungan atas Dukungan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian dan Fasilitas Gedung Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Kota Madiun
13. Penghargaan atas prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor 3.3805 dan status kinerja Sangat Tinggi berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2018 dari Provinsi Jawa Timur
14. Penghargaan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 dari Kementerian Keuangan
15. Penghargaan Sertifikat Proklamasi Utama tahun 2020 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada RW 08 Kelurahan Rejomulyo, Kota Madiun
16. Penghargaan Sertifikat Proklamasi Utama tahun 2020 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada RW 08 Kelurahan Banjarejo, Kota Madiun



17. Juara 2 Tingkat Nasional Lomba Wajah Bahasa Sekolah tahun 2020 untuk SMP Negeri 1 Madiun yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
18. Terbaik I Kompetisi Kelompok Budaya Kerja (KBK) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2020 kategori Pelayanan Administrasi Kepada KBK Guntur Bu Lis Ra Mendo dari SDN 01 Kartoharjo Dinas Pendidikan Kota Madiun
19. Penghargaan Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Provinsi Jawa Timur tahun 2020 kepada Sepeda Si Badu – Segera Periksa Dahak Siapapun Batuk Lebih Dua Minggu Puskesmas Demangan Kota Madiun
20. Penghargaan Kementerian Kesehatan Kepada Lurah Rejomulyo Kota Madiun, Bambang Agus Sunaryo, S.Sos sebaga Kepala Desa/Kota SBS/ODF dalam upaya untuk Mengubah Perilaku Masyarakat yang Higienis dan Saniter melalui Pendekatan STBM tahun 2020
21. Dalang terbaik atas nama Nabil Ekri Rasfadillah Erlambang dalam Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional 2020 Kelompok Kategori B usia 12-15 tahun yang diselenggarakan oleh Persatuan Perdalangan Indonesia (Pepadi) Pusat
22. Juara I Lomba Taman herbal Bejo Jahe Merah Provinsi Jawa Timur 2019-2020
23. Penghargaan Pengelola Aspek dengan Keberlanjutan Inisiatif Terbaik Kategori Instansi Pemerintah Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik tahun 2020 dalam Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik tahun 2020
24. Penghargaan Terbaik 1 Diseminasi Hasil Fasilitasi Peningkatan Mutu Melalui Daring dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur kepada SDN 01 Pandean
25. Penghargaan Terbaik Diseminasi Hasil Fasilitasi Peningkatan Mutu Melalui Daring Dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur kepada SDN 02 Pangongangan



26. Penghargaan Anugerah Karya Utama Adminduk 2020 Terbaik I Kategori Jumlah Penduduk 0-750 ribu jiwa Tingkat Jawa
27. Penyedia Layanan Informasi Terbaik Tahun 2020 dari Komisi Informasi Jawa Timur.
28. BKKBN Representative in East Java Province, Accomplishment in Creating Video on Bangga Kencana Program Promotion as the 2nd Best Video for Post Partum Family Planning Program in RSUD Sogaten Kota Madiun
29. Juara 3 Pemilihan Duta Generasi Berencana Tahun 2020 Tingkat Nasional atas nama Dhefara Hersaning Djati
30. Penghargaan sebagai Penyedia Layanan Informasi Terbaik Kategori Kota Kabupaten dalam KI Award Tahun 2020 dari Komisi Informasi Jawa Timur
31. Penghargaan sebagai Badan Publik Menuju Informatif dengan nilai 80-96 kategori Kota/Kabupaten dalam KI Award Tahun 2020 Tahun 2020 dari Komisi Informasi Jawa Timur
32. Penghargaan atas capaian nilai Standar Nasional Pendidikan (SNP) mencapai 6,85 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada SMP Negeri 2 Madiun
33. Penghargaan sebagai Pemerintah Kota Peduli Penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur
34. Penghargaan sebagai Kota Sangat Inovatif dalam Innovative Government Award 2020 Kementerian Dalam Negeri
35. Anugerah Pendidikan 2020 Widya Wiyata Dharma Samya

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan maka program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun antara lain adalah sebagai berikut :

1. Lanjutan Laptop Gratis
2. Lanjutan Pembangunan Sumber Umis

3. Pembangunan Kantong Parkir (Lapangan PELTI dan Ex Gedung SMP 12
4. Pengembangan Kawasan Rimba Dharma
5. Rintisan Pembangunan PECELAND
6. Pengembangan Kawasan Kelurahan Mandiri
7. Rintisan Pembangunan Ring Road Timur

Dengan ditetapkannya regulasi kebijakan pusat yang sangat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan maupun penganggaran, maka Pemerintah Kota sedang melakukan perubahan RPJMD Tahun 2019-2024. Berikut gambaran terkait perubahan RPJMD Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019-2024 terhadap pencapaian visi misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun.

Gambar III.14. Dasar Perubahan RPJMD Madiun 2019-2024



Sumber Data : Bapelitbangda Kota Madiun

Gambar III.15. Konstruksi Pencapaian Visi Walikota dan Wakil Walikota pada Perubahan RPJMD Madiun 2019-2024



Sumber Data : *Bapelitbangda Kota Madiun*

Gambar III.16. Proses Bisnis Perubahan RPJMD Madiun 2019-2024



Sumber Data : *Bapelitbangda Kota Madiun*



P BAB IV ENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Madiun berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2020 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Madiun dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 dikategorikan memuaskan, karena nilai capaiannya di atas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.

Di antara capaian 24 (dua puluh empat) Indikator Sasaran pembangunan Pemerintah Kota Madiun sebanyak 9 (sembilan) Indikator Sasaran yang tidak tercapai. Capaian kinerja ini memang belum sesuai dengan yang diharapkan, karena Pemerintah Kota Madiun sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia tengah melakukan upaya-upaya penanganan Covid-19. Hal ini sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan program-program selanjutnya sehingga capaian indikator sasaran dapat memenuhi target yang ditetapkan.

B. Permasalahan

Permasalahan tidak tercapainya 9 (sembilan) delapan indikator sasaran tersebut antara lain disebabkan oleh :

1. Pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan perubahan pola hidup baru dengan mengedepankan protokol kesehatan sehingga kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak seperti pelatihan tidak diperkenankan.



2. Data merupakan data proyeksi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kota Madiun karena penghitungan data belum selesai/final terutama untuk data BPS angka masih bersifat sementara.
3. Terdapat realokasi anggaran maupun fokus kegiatan dengan mengutamakan mitigasi kebencanaan terhadap pandemi COVID-19 sehingga terdapat kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya terhambat dan atau bahkan tidak dapat dilaksanakan di tahun 2020
4. Perubahan yang sangat ekstrim terjadi di lapangan dengan adanya wabah Covid 19 yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga berdampak pula pada perekonomian di Kota Madiun yang juga berimbas kepada pertumbuhan sektor perdagangan, pengolahan maupun pariwisata serta tingkat pengangguran terbuka.
5. Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berpengaruh terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, struktur perencanaan maupun anggran.

C. Upaya Meningkatkan Kinerja

Langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun untuk meningkatkan kinerjanya antara lain :

1. Melaksanakan pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama pelaksanaan kepada masyarakat dengan memprioritaskan ketersediaan dana untuk penanganan Covid-19
2. Sinkronisasi prioritas pembangunan dengan provinsi maupun pusat
3. Fokus terhadap program prioritas yaitu kelurahan mandiri, ekonomi kerakyatan dan pembangunan berbasis masyarakat
4. Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan di masa pandemi dengan memperhatikan protokol kesehatan



5. Melakukan Perubahan SOTK dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
6. Melakukan perubahan RPJMD 2019-2020 dengan proses bisnis utama peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan ekonomi dan daya saing daerah
7. Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran berdasarkan proses bisnis Perangkat Daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi mis Walikota dan Wakil Walikota
8. Melakukan upaya-upaya dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun